



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN
CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI - PROVINSI JAWA BARAT**

TESIS

**RINA ERLINA BERLIANA
0706181731**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 27 January 2012



(Rina Erlina Berliana)

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kemurahan-Nya, saya dimampukan untuk menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Ekonomi pada program studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai masa perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Budi Sulistyowati, MA., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak Triman Toro, selaku staff Program MPKP, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta semangat bagi saya;
3. Bapak Arie Sukarya, Kepala PMU Badan Pusat Statistik Jakarta, yang telah memberikan bantuan dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4. Pimpinan *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG), Bapak Mike Halse, Bapak Bob Holland, Bapak Stuart McAdam, dan Ibu Fiona Kotvojs, selaku atasan sekaligus mentor dimana saya bekerja yang telah banyak memberikan dukungan dan kemudahan;
5. Papi Poltak Anggara Halomoan Marpaung (Alm.) dan Mami Meriaty Marpaung binti Matnudin (Alm.), *from heaven above, may you be proud of me, this is for you, I love and miss you both everyday!* ;
6. Suami terkasih, sekaligus sahabat, guru dan Krunyi's daddy: Adi Abidin *can't do more without your love, support and encouragement! Thank you for always being there and stay late at night for me!*

ABSTRAK

Nama : Rina Erlina Berliana
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Peranan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa-Barat

Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sosialisasi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

Kata kunci:

Partisipasi, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan

ABSTRACT

Name : Rina Erlina Berliana
Study Program : Magister of Planning & Public Policy
Judul : Community Participation on the Implementation of Kecamatan Development Program in Cibadak Sub-district, Sukabumi district, West Java Province.

This focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women.

Key words:

Participation, community empowerment, poverty alleviation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.7. Ruang Lingkup Penelitian	17
1.7.1. Ruang Lingkup Materi	17
1.7.2. Ruang Lingkup Wilayah	18
1.8. Sistematika Penulisan	20
2. TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1. Kemiskinan dan Pembangunan	22
2.2. Pengertian Pembangunan Desa	23
2.3. Hakekat Pembangunan Desa.....	24
2.4. Partisipasi Masyarakat	28
2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	28
2.4.2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat	30
2.4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	34
2.5. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan	36
2.5.1. Pengertian Efektivitas	36
2.5.2. Pemberdayaan Masyarakat.....	40
2.5.3. Krisis Ekonomi.....	43
2.5.4. Masyarakat Miskin dan Masyarakat Terkena Dampak Krisis Ekonomi	45
3. METODOLOGI PENELITIAN	49
3.1. Desain Penelitian.....	49
3.2. Metode Pengumpulan Data	51
3.3. Sumber Data	51
3.4. Latar dan Lapangan Penelitian.....	52

3.5. Instrumen Penelitian.....	52
3.6. Tahap dan Proses Penelitian.....	53
3.7. Logistik Penelitian	55
3.8. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data.....	55
3.9. Teknik Pengolahan Data	57
3.10. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	57
3.11. Teknik Penafsiran Data	58
3.12. Lokasi Penelitian	58
4. TEMUAN LAPANGAN	60
4.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian	60
4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	60
4.1.2. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	62
4.1.3. Pendidikan dan Kesehatan	64
4.2. Kegiatan PPK dan Pelaksanaannya di Kecamatan Cibadak	65
5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ANALISIS SWOT	81
5.1. Identifikasi Permasalahan	85
5.2. Skala Prioritas Masalah.....	88
5.3. Alternatif Solusi	88
5.4. Analisis SWOT	90
5.5. <i>The Best of Solution</i>	96
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ACTION PLAN	99
6.1. Kesimpulan	99
6.2. Rekomendasi <i>Scenario Action Plan</i>	100
DAFTAR REFERENSI	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Siklus Kegiatan PPK	14
Gambar 5.1. Identifikasi Permasalahan	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informasi Wilayah Penelitian	19
Tabel 4.1. Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukabumi.....	61
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Cibadak	63
Tabel 4.3. Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan.....	64
Tabel 4.4. Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi ..	65
Tabel 5.1. Tahapan Proses PPK Kecamatan Cibadak.....	81
Tabel 5.2. Tahapan Proses PPK Desa Karangtengah.....	82
Tabel 5.3. Tahapan Proses PPK Desa Pamuruyan	83
Tabel 5.4. Tahapan Proses PPK Desa Neglasari.....	84
Tabel 5.5. Skala Prioritas Masalah.....	88
Tabel 5.6. Alternatif Solusi	89
Tabel 5.7. Analisis SWOT(1). Sosialisasi Program bagi Masyarakat	90
Tabel 5.8. Analisis SWOT (2). Sosialisasi Program bagi Aparat Kuota Kehadiran.....	91
Tabel 5.9. Analisis SWOT (2). Sosialisasi Program bagi Aparat Akses Waktu/Jarak/Bahasa.....	92
Tabel 5.10. Analisis SWOT (3). Sosialisasi Program bagi Pendamping Menggali Potensi.....	93
Tabel 5.11. Analisis SWOT (3). Sosialisasi Program bagi Pendamping Panduan Fasilitasi.....	94
Tabel 5.12. Analisis SWOT (3). Sosialisasi Program bagi Pendamping Kajian Kinerja	95
Tabel 6. <i>Scenario Action Plan</i>	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Temuan Kecamatan Cibadak	108
Lampiran 2. Photo Penelitian	110
Lampiran 3. Interview Guide	112



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini berkisar pada partisipasi masyarakat desa sebagai faktor pendorong proses pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan atau PPK. Program PPK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif, dan pembangunan prasarana yang mendukung secara langsung kegiatan sosial ekonomi di pedesaan.

Kemiskinan terus menjadi masalah berkepanjangan selama sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurang memiliki akses terhadap pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan telah menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit (Sahdan, 2004).

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, lelaki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sungguh kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat,

melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Indonesia saat ini sedang berada di ambang era yang baru. Sesudah mengalami krisis multi-dimensi (ekonomi, sosial, dan politik) pada akhir tahun 1990-an, Indonesia telah kembali bangkit. Berdasarkan laporan tahunan 2008 dari Bank Dunia, dinyatakan bahwa secara garis besar, negeri ini telah pulih dari krisis ekonomi yang menjerumuskan kembali jutaan warganya ke dalam kemiskinan pada tahun 1998 yang telah menurunkan posisi Indonesia menjadi salah satu negara berpenghasilan rendah. Lebih lanjut Bank Dunia juga menyatakan bahwa Indonesia telah berhasil kembali menjadi salah satu negara berkembang berpenghasilan menengah, dan bahwa angka kemiskinan yang meningkat lebih dari sepertiga kali selama masa krisis (23 persen lebih pada tahun 1999, atau sekitar 48 juta) telah kembali pada kondisi sebelum krisis (16 persen pada tahun 2005, atau sekitar 35 juta). Sementara itu, Indonesia telah mengalami transformasi besar di bidang sosial dan politik, berkembang dengan demokrasi yang penuh semangat dengan adanya desentralisasi pemerintahan, serta keterbukaan yang jauh lebih luas dibandingkan pada masa lalu (Steer, 2006).

Selama tiga dekade, upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia lebih banyak dilakukan dengan menitik-beratkan pada penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Sebagai contoh program penanggulangan kemiskinan yang pernah dilaksanakan misalnya P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal), dan PKPS-BBM (Program Kompensasi Pengganti Subsidi BBM) bidang pendidikan misalnya BKM (Bantuan Khusus Murid), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), juga BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Dari serangkaian cara dan strategi penanggulan kemiskinan tersebut, hampir semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Disamping itu, tidak adanya tatanan pemerintah yang demokratis menyebabkan rendahnya

akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Hureirah, 2005).

Dalam rangka mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2005 melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2005 membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang merupakan penyempurnaan dan kelanjutan dari Keppres No. 124 Tahun 2001 jo. Keppres No. 8 tahun 2002 jo. Keppres No. 34 tahun 2002 mengenai Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TTPK) ini merupakan forum lintas pelaku-forum nasional, forum regional dan/atau forum nasional-regional-yang terdiri dari semua unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, usaha nasional, kelompok swadaya masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya, untuk menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju, bagi peningkatan keberhasilan penanggulangan kemiskinan.

Program PPK merupakan investasi Pemerintah RI dalam bentuk asset, sistem pembangunan partisipatif dan kelembagaan. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta perwujudan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui program ini diharapkan terwujud sistem pengaturan dan pengurusan (*governance system*) segala bentuk sumberdaya secara sehat, dimana semua pelakunya bersikap saling memberdayakan, memperkuat dan melindungi (Indroyono, 2003).

Program PPK berawal pada tahun 1998, saat itu Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia bekerjasama mengadakan diskusi, pembahasan dan desain dengan melihat terjadinya gejolak politik dan ekonomi yang semakin memburuk dan bencana kekeringan yang berkepanjangan mengakibatkan bertambah buruknya kondisi masyarakat miskin di pedesaan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan PPK, pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan yang besar sebagai dampak kekuasaan otoriter selama 32 tahun, yaitu terhambatnya inisiatif daerah (masyarakat) dalam mengambil keputusan. Pemerintah masa lalu tidak memandang kemampuan daerah dan sangat membatasi perkembangan

kelembagaan masyarakat. Secara tradisi pemerintahan desa justru lebih mewakili kepentingan pusat daripada kepentingan daerah dan pejabat daerah memiliki sedikit tanggung jawab. Pemerintah umumnya kurang tanggap terhadap kebutuhan daerah, pemilihan proyek serta pemanfaatannya diserahkan kepada pejabat tingkat atas pada elit pemerintahan desa. Kesalahan dalam pengelolaan dana program pemerintah ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan, sehingga dalam pengelolaan dana tersebut dianggap tidak mampu menyediakan layanan-layanan vital kebutuhan masyarakat.

Memasuki tahun 2000, Indonesia mulai memberlakukan Undang-undang Pemerintah Daerah atau sistem desentralisasi, yang dianggap sangat positif *bottom up* dari pusat ke daerah. Meskipun telah dilaksanakannya sistem ini, namun ternyata perwujudan pemerintahan yang lebih demokratis dan mandiri masih menjadi tantangan yang berat. Sehingga kemudian dirancanglah kegiatan PPK untuk mendorong agar pemerintahan dan lembaga masyarakat yang paling rendah juga mampu membuat keputusan bagi pembangunan desa, dan juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan mendorong bentuk pemerintahan lokal yang lebih partisipatif.

Program PPK sendiri merupakan bagian utama dari upaya jangka menengah dan jangka panjang pemerintah dalam menanggapi desentralisasi dan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya pemerintah daerah di wilayah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bentuk pemerintahan lokal yang demokratis dan partisipatif dengan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan mereka sendiri. Kegiatan PPK merupakan percobaan kunci dalam pembangunan pedesaan. Program ini belajar dari kegagalan, keberhasilan dan pelajaran program lain yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Visi jangka panjang PPK sendiri adalah mengurangi kemiskinan dan memberikan pendekatan yang nyata dan tepat bagi pembangunan pedesaan di Indonesia.

Secara khusus kegiatan PPK dirancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif dan pembangunan prasarana serta sarana pedesaan. Dalam kegiatan PPK masyarakat turut campur dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Campur tangan masyarakat ini merupakan

partisipasi yang diharapkan dalam proses kegiatan pembangunan karena masyarakat nantinya kembali akan menerima hasil dari pembangunan itu sendiri. Dalam prosesnya dalam kegiatan PPK, masyarakat melaksanakan musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) guna membahas usulan kegiatan, memberikan tanggapan, saran-saran sehingga menentukan dalam pengambilan keputusan. Hasil keputusan tersebut kemudian diusulkan ke Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di kecamatan.

Distribusi bantuan pendanaan PPK disalurkan ke setiap kecamatan dan diproses melalui Forum UDKP untuk disampaikan kepada pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua I LKMD serta tiga wakil (satu orang wakil laki-laki dan dua orang wakil perempuan) yang dipilih dari masing-masing desa yang berpartisipasi. UDKP juga membentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk mengelola dana PPK dan mengawasi usaha-usaha skala besar lainnya.

Besarnya bantuan dana yang diberikan untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat bervariasi tergantung pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta sesuai dengan data dari kecamatan. Khususnya untuk Kabupaten Sukabumi, bantuan dana PPK diterima selama phase pertama untuk tiga tahun anggaran berjalan dengan jumlah bantuan yaitu: Tahun 1 (pertama) TA 1998-2001 diberikan pada 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah bantuan Rp. 8.000.000.000,- Tahun 2 (kedua) TA 2002-2005 diberikan pada 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah bantuan Rp. 16,500,000,000,- dan Tahun 3 (ketiga) TA 2005-2007 diberikan pada 7 (tujuh) kecamatan dengan jumlah bantuan Rp. 13,000,000,000,- Kecamatan Cibadak sendiri telah menerima dana bantuan PPK pada phase ketiga dengan jumlah bantuan dana PPK sebesar Rp. 4,500,000,000,-

Secara khusus tujuan program PPK adalah:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat di desa dan di kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.

- Menyediakan prasarana dan sarana bagi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa.
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum pelaksanaan kegiatan PPK di Kecamatan Cibadak telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Sejumlah prasarana dan sarana telah dibangun dan dikembangkan seperti pembangunan dan perbaikan jalan desa, pembangunan jembatan, pembangunan air serapan dan pengairan, pembangunan tanki air, serta perbaikan sarana posyandu. Kegiatan PPK juga telah membuka kesempatan untuk meningkatkan kegiatan usaha kelompok masyarakat setempat, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan melalui kegiatan usaha ekonomi produktif atau simpan pinjam. Kegiatan PPK juga tercatat telah memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan masyarakat setempat dengan telah menyerap sekitar 4,930 orang pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan PPK.

Namun demikian sejumlah permasalahan terkait partisipasi masyarakat dan peningkatan kemampuan fasilitasi dari aparat dan lembaga masyarakat masih menjadi kendala dalam pencapaian tujuan PPK, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal partisipasi, masyarakat belum terlibat secara aktif dalam setiap proses tahapan kegiatan PPK. Masyarakat belum memiliki wewenang yang berarti untuk dapat secara mandiri berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan juga belum terlihat mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin. Demikian pula dalam hal pengambilan keputusan pembangunan yang belum dilakukan secara optimal melalui suatu proses musyawarah dan mufakat yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat miskin. Sedangkan terkait peran aparat terlihat masih mendominasi dalam menentukan arah dan pelaksanaan program pembangunan. Lembaga masyarakat desa dan kecamatan yang ada juga belum dapat secara maksimal

memfasilitasi peran masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat seyogyanya sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam pembangunan diperlukan adanya suatu sistem yang dapat memadukan kegiatan pemerintahan dan partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan desa. Agar partisipasi masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses kegiatan PPK, pemerintahan daerah (Kepala Desa) dan anggota lembaga masyarakat seperti LKMD hendaknya dapat memberikan informasi yang tepat dan mampu mengikutsertakan mereka dalam pengambilan keputusan mulai dari awal sampai pada akhir kegiatan pembangunan.

Secara umum, partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dalam pelaksanaan kegiatan PPK masih termasuk lemah, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pada proses kegiatan PPK. Masyarakat banyak mengeluh kurang menerima informasi, serta tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan seperti dalam forum musyawarah oleh aparat pemerintah desa (kepala desa) dan unsur lembaga masyarakat (LKMD). Perencanaan pembangunan belum secara optimal memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan seperti penetapan prioritas kegiatan yang akan diajukan, ternyata lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa serta aparat dan LKMD tanpa melibatkan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki patron yang kuat, seorang kepala desa berintegritas yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam memimpin desa. Masyarakat juga sering kali bersikap pasif, tidak peduli dan lebih bersikap menyerahkan segala sesuatunya terkait pembangunan di daerahnya kepada aparat desa.

Kendala semacam ini pada akhirnya memberikan kesempatan bagi aparat desa, yakni kepala desa dan pengurus LKMD, untuk melakukan tindak korupsi dan sejumlah penyelewengan lainnya. Sebagai contoh ada sejumlah pengaduan terkait penambahan harga secara signifikan dalam usulan desa dan bahan- bahan untuk proyek-proyek prasarana, yakni jembatan, jalan, dan penyediaan air bersih. Bahan- bahan tidak di beli, tetapi diambil dari lingkungan sekitar. Juga ada

adanya informasi terkait dana simpan pinjaman yang dimonopoli oleh elit desa yang relatif sudah lebih mampu, ataupun kasus dimana tanki penyaluran air dibangun didepan rumah Kepala Desa. Fakta juga menunjukkan di beberapa desa bahwa terjadi pengambil-alihan tugas dan fungsi Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD), sedangkan Kepala Desa di wilayah tersebut hanya sebagai Pembina kegiatan PPK, bukan sebagai pelaksana.

Berdasarkan sejumlah ulasan tersebut diatas, maka tema utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan PPK.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PPK di Kecamatan Cibadak
2. Faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan semacam PPK

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan dilapangan, yaitu lemahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPK.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat semacam PPK.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan peranan partisipasi masyarakat, khususnya dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PPK.
2. Bahan perbandingan bagi penelitian lainnya.

1.5. Kerangka Pemikiran

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan selain sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, lelaki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lebih lanjut Bappenas juga menyatakan lemahnya partisipasi sebagai salah satu indikator kemiskinan. Berbagai kasus seperti pengusiran petani dari wilayah garapan, tiadanya jaminan kesehatan serta hak atas pendidikan bagi orang miskin menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sekaligus pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan ini juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan atau program pembangunan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan lain yang memungkinkan keterlibatan masyarakat.

Tjokrowinoto (1995:35) berpendapat bahwa pembangunan sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan adalah merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan bersama-sama. Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan desa haruslah melibatkan dan dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa. Bahwa setiap perencanaan maupun putusan untuk melaksanakan proyek pembangunan selayaknya bukan atas prioritas kekuasaan, melainkan merupakan keinginan dan keputusan bersama anggota masyarakat desa lainnya.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah merupakan salah satu proyek pembangunan yang berbasis masyarakat yang dimulai pertama kali tahun 1998. Program pemerintah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, memperkuat pemerintahan daerah dan lembaga masyarakat, serta meningkatkan tata pemerintahan daerah. Konsep awal PPK dipengaruhi oleh beberapa program lain yang ada di Indonesia dan juga di dunia seperti Proyek Prasarana Perdesaan Indonesia dari Bank Dunia (VIP), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Dana Pengembangan Tingkat Perdesaan oleh GTZ, serta pengalaman dengan dana sosial Bank Dunia di negara lain. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip pokok PPK antara lain adalah:

- *Partisipasi* masyarakat dan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. Masyarakat harus dapat terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan program, mulai dari perencanaan dan pengambilan keputusan hingga tahap pelaksanaan dan pengawasan.
- *Kesetaraan dan keadilan gender*. Lelaki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- *Desentralisasi* yakni kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- *Transparansi*. PPK menekankan transparansi dan penyebarluasan informasi disemua tahapan program. Pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terbuka dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat. Seluruh warga harus bisa mengakses informasi penting mengenai program.
- *Kesinambungan*. Kegiatan harus berkesinambungan, berdasarkan kemandirian masyarakat dan pengelolaan pedesaan dari semua kegiatan. Setiap kegiatan harus mudah dikelola dan dipelihara oleh masyarakat.
- *Sederhana*. PPK berusaha agar program bersifat sederhana. Tidak boleh ada aturan atau prosedur yang rumit serta menggunakan strategi dan metode yang sederhana pula.
- *Kompetisi untuk Dana*. Masyarakat harus berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan dana PPK. Program ini harus dapat mendorong warga desa untuk memilih kegiatan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri.

PPK menyediakan paket bantuan keuangan dimulai dari Rp. 500 juta hingga Rp. 1,5 milyar kepada setiap kecamatan. Masyarakat desalah yang kemudian memutuskan apakah dana akan digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana umum atau pinjaman kepada kelompok-kelompok yang ada untuk modal kerja. Dana ini tersedia setiap tahun selama tiga tahun.

Ada beberapa tahapan kegiatan pelaksanaan PPK sebagaimana dapat dilihat dalam diagram 1 dibawah, yakni diseminasi informasi, perencanaan,

penyiapan usulan dan verifikasi, pemilihan proyek, pelaksanaan dan pengawasan proyek, dan pemeliharaan proyek. Semua tahapan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan transparansi selama proses berjalan.

Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PPK:

1. Diseminasi Informasi

Diseminasi informasi PPK dilakukan berbagai cara. Antara lain melalui lokakarya yang dilakukan di tingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan, yang bertujuan untuk mensosialisasikan informasi dan mempopulerkan program ini. Lokakarya dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, pers lokal, perguruan tinggi dan LSM. Diseminasi di tingkat desa disampaikan melalui Musyawarah Pembangunan Desa (musbangdes), Musyawarah Pembangunan Dusun (musbangdus), dan pertemuan kelompok untuk menyebarkan-luaskan informasi PPK dan mendorong masyarakat mengusulkan ide yang didukung PPK. Biasanya kurang lebih 50-100 orang diharapkan dapat menghadiri pertemuan semacam ini.

2. Perencanaan

Rapat perencanaan berlangsung di tingkat dusun dan desa. Fasilitator Desa dan Kecamatan akan memberi informasi mengenai prosedur PPK dan mendorong warga desa untuk menyampaikan usulan yang didanai PPK. Kemudian dalam Musbangdes II, usulan masyarakat akan dibahas dan forum akan menentukan usulan mana yang akan diajukan dalam UDKP II sebagai usulan desa. Tahap perencanaan PPK biasanya berjalan selama dua sampai tiga bulan hingga masyarakat bisa memahami prosedur PPK dan mengajukan usulan untuk didanai.

3. Penyiapan Usulan dan Verifikasi

Masing-masing LKMD desa dapat mengajukan maksimum dua usulan ke forum UDKP. Jika ada dua usulan, maka usulan kedua harus berasal dari kelompok perempuan. Besarnya usulan desa yang bisa didanai minimum Rp. 35 juta dan maksimum Rp. 150 juta. PPK juga dapat memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi dan hibah untuk kegiatan prasarana umum. Usulan

yang diajukan bisa digabungkan antara kegiatan ekonomi dan prasarana jika dikehendaki oleh masyarakat. Warga desa dapat menyiapkan usulan gabungan, misalnya untuk irigasi antar desa, jalan, atau penyediaan air. Namun PPK tidak memperbolehkan pembangunan prasarana tingkat kabupaten, yang mempunyai anggaran dan wilayah tanggung jawab sendiri. Kebijakan “*Open Menu*” adalah aspek penting dalam PPK, hal ini memungkinkan warga desa untuk menentukan sendiri keinginan mereka.

Untuk kegiatan ekonomi, kelompok peminjam haruslah yang sudah berumur paling sedikit satu tahun. Tingkat suku bunga harus mengikuti tingkat pasar dan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimum 18 bulan. Jadwal pengembalian harus sesuai jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan dan menguntungkan dan harus disetujui anggota kelompok. Jadwal pembayaran kembali harus dilampirkan dalam usulan yang disetujui di UDKP II.

Untuk kegiatan prasarana, bantuan teknis desa harus diidentifikasi dan dipakai dalam persiapan usulan. Pembangunan prasarana umum harus memenuhi standar mutu desain teknis, bermanfaat untuk masyarakat miskin, dan memasukkan rencana serta anggaran untuk pemeliharaan setelah kegiatan dilaksanakan, termasuk pengelolaan dan besarnya iuran. Masyarakat desa diharapkan bisa menyumbangkan tenaga dan/atau material sehingga swadaya dapat dimaksimalkan. Tidak ada ketentuan untuk menetapkan besarnya swadaya masyarakat, tetapi semakin besar swadaya akan semakin menguntungkan dalam penilaian usulan di forum UDKP II.

Verifikasi dari unsur teknis usulan dilakukan selama tahap pengkajian usulan hingga dipilihnya suatu kegiatan. Tim Verifikasi Kecamatan terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, fasilitator kecamatan dan tenaga teknis yang sesuai yang direkomendasikan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten. Konsultan Manajemen Kabupaten juga melakukan pemeriksaan akhir sebelum hasil verifikasi disampaikan dan dibahas dalam Forum UDKP II. Tim Verifikasi meninjau beberapa kriteria seperti (1) usulan layak secara teknis dan

ekonomis, serta bermanfaat bagi orang banyak, khususnya orang miskin; (2) ada rencana pemeliharaan atau rencana pengembalian pinjaman untuk pinjaman ekonomi; (3) masyarakat benar-benar berpartisipasi dalam merumuskan gagasan usulan, dan mengetahui apa bentuk sumbangan dari masyarakat. Tahap verifikasi biasanya berlangsung selama tiga hingga empat minggu, tahap ini sangat penting untuk menyaring kegiatan-kegiatan yang memiliki rancangan dan kualitas yang baik.

4. Pemilihan Proyek

Usulan desa dibahas di tingkat kecamatan dalam Forum UDKP II. Forum ini meninjau temuan tim verifikasi dan membahas manfaat dan anggaran dari setiap usulan. Biasanya kurang lebih 50 orang yang hadir dalam forum ini. Keputusan akhir dari pertemuan UDKP II dipasang pada papan informasi PPK dan diberitahukan kepada warga desa melalui pertemuan tingkat desa, Musbangdes II, dan pertemuan dusun ataupun kelompok.

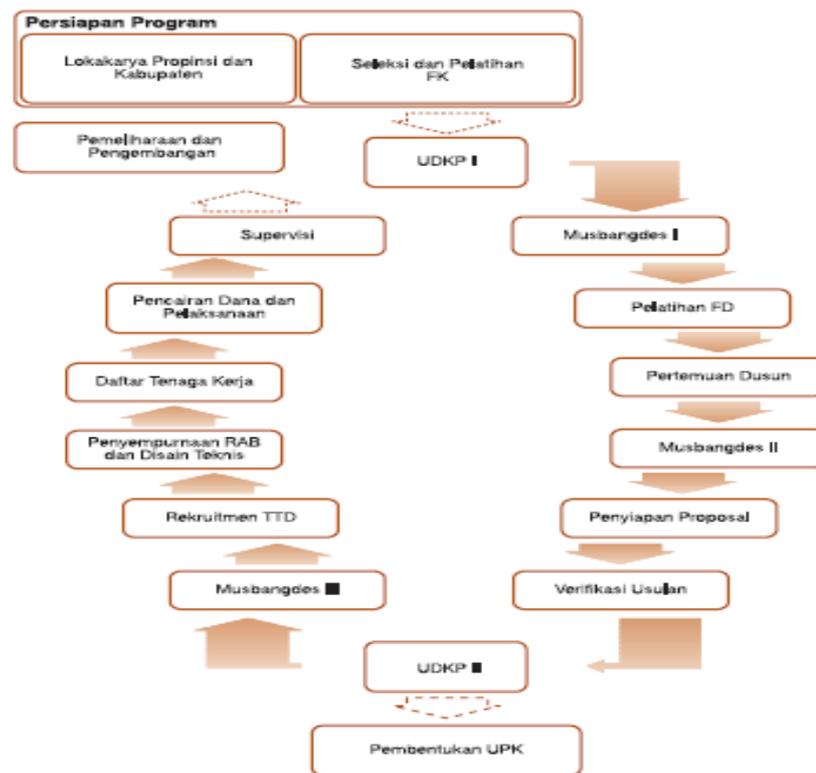
5. Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek

Setelah diputuskan kegiatan mana yang layak didanai, tim teknis desa dibentuk dan dikontrak. Kontrak ditandatangani oleh LKMD dan diketahui oleh Konsultan Kabupaten. Setelah desain teknis selesai lalu mencari tenaga kerja. Tim Pelaksana terdiri dari lima orang di tiap desa yang dipilih dalam Musbangdes III untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan. Dana diambil dari rekening desa untuk pembangunan prasarana dan pinjaman ekonomi. Swadaya masyarakat juga dikumpulkan. Fasilitator Kecamatan, PJOK (Pimpinan proyek PMD tingkat Kecamatan) membantu kelompok dalam masalah administrasi dan keuangan LKMD. Masyarakat, pejabat pemerintah dan konsultan PPK mengawasi pelaksanaan kegiatan. Setiap status pelaksanaan dianjurkan untuk dilaporkan dalam pertemuan desa.

6. Pemeliharaan

Setelah kegiatan prasarana selesai, tim pemeliharaan dan biaya retribusi segera ditetapkan. Masyarakat desa kemudian membentuk Panitia Pelaksana

dan Pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan iuran pemeliharaan. Untuk bantuan ekonomi, pengembalian pinjaman dikumpulkan oleh UPK untuk jangka waktu maksimal 18 bulan.



Gambar Diagram 1. Siklus Kegiatan PPK

(Sumber: National Management Consultant dan Sekretariat National PPK)

Menurut Juliantara (2002:87) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Literatur klasik menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan. Lebih lanjut Mubyarto (1984:35) mengatakan bahwa dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat merupakan ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan rakyat untuk menentukan

nasibnya sendiri, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat desa di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih termasuk lemah, baik dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan hingga pada tahap pelaksanaan dan pengawasa serta evaluasi terhadap kegiatan PPK. Hal ini ditandai dengan banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak mengerti dan tidak menerima informasi yang selayaknya terkait kegiatan ini. Sehingga mengakibatkan minimnya keterlibatan mereka dalam forum musyawarah desa dan dusun. Masyarakat juga menyampaikan tidak dilibatkan dalam proses pengajuan usulan kegiatan hingga pengambilan keputusan penentuan usulan kegiatan. Hal ini tentunya berdampak terhadap efektivitas program dan hasil pembangunan, yang menjadi kurang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat kegiatan PPK menjadi kurang berhasil dalam mewujudkan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan sosial yang memungkinkan setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabatnya, dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya, dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Segel dan Bruzy (1998:8) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah meliputi tingkat kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Sedangkan Midgley (1995:14) mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur yakni pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dapat dikendalikan; kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi; dan ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Ketiga unsur ini berlaku bagi individu, keluarga, komunitas, dan seluruh masyarakat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Nazir (1983), penelitian deskriptif adalah suatu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisisnya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, yakni data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:105). Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi empat tahap utama, yaitu:

- a. Tahap Persiapan yang meliputi persiapan perijinan, menyusun rancangan penelitian (penyusunan kuisioner, identifikasi narasumber, dan sebagainya), serta persiapan logistik terkait lainnya.
- b. Tahap Kajian atau Penelitian Kepustakaan atau penelusuran literature.
- c. Tahap Penelitian Lapangan, yakni dimana peneliti melakukan observasi/pengamatan, pengambilan data primer melalui wawancara semis terstruktur dengan informan kunci serta pengamatan aktivitas dan lokasi penelitian melalui sketsa suasana dan pengambilan gambar sebagai data fisik.
- d. Tahap Inventarisasi dan Analisis Data yakni meliputi kegiatan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder yakni melalui studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa bahan bacaan, dokumen dan sumber literatur yang ada hubungannya dengan materi yang diteliti yang dapat memperkuat materi pembahasan.
- b. Data Primer yakni melalui studi lapangan, yakni pengumpulan data dari informan yang telah terlebih dahulu diidentifikasi yakni melalui observasi / pengamatan langsung serta wawancara secara langsung.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Dalam hal ini yakni berbagai data yang mempunyai keterkaitan atau hubungan terkait partisipasi masyarakat, pembangunan dan program pengentasan kemiskinan. Analisis SWOT juga dilakukan dalam penelitian ini guna menemukan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan semacam PPK.

Lebih lanjut metode penelitian dipaparkan secara lebih mendalam dalam Bab III dari penelitian ini.

1.7. Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1. Ruang Lingkup Materi

Partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu program pembangunan khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan di dalam suatu negara. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai bagian dari proses kegiatan pembangunan yang lebih mandiri, demokratis dan berkelanjutan. Namun demikian banyak program pembangunan serta program pengentasan kemiskinan yang mengesampingkan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam

setiap tahapan program pembangunan. Banyak masyarakat khususnya masyarakat miskin di wilayah pedesaan yang bahkan kurang menerima informasi serta tidak dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Hal ini bukan saja mengakibatkan lemahnya fungsi kontrol masyarakat, tetapi juga mengakibatkan program yang berjalan menjadi tidak efektif, bahkan tidak mencapai sasaran. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang peranan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Program Kecamatan (PPK) di Kecamatan Cibadak pada tahun 2005-2008.

Dengan demikian, maka ruang lingkup materi dari penelitian adalah mengenai peranan partisipasi masyarakat yang dibatasi hanya pada permasalahan peranan masyarakat yang masih lemah dalam pelaksanaan PPK dan upaya meningkatkan peran partisipasi masyarakat di masa mendatang dalam program penanggulangan kemiskinan semacam kegiatan PPK. Adapun materi yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik wilayah penelitian, dimana materi yang dibahas adalah tentang lokasi geografis serta kondisi fisik lingkungan penduduk. Hal ini dirasa penting dibahas karena lingkungan alam seperti kondisi geografis mempengaruhi pola hidup masyarakat seperti pola pemenuhan kebutuhan hidup, serta pola kehidupan sosial masyarakat.
- b. Karakteristik masyarakat di wilayah penelitian, seperti kondisi ekonomi, karakteristik sosial serta politik masyarakat.
- c. Indikasi peranan partisipasi masyarakat dimana dalam model pembangunan daerah dimasa kini dan masa depan telah menjadi fokus dan salah satu unsur dalam pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Pelaksanaan Program PPK di wilayah penelitian yang mencakup mekanisme perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan, kelompok sasaran, serta keterlibatan masyarakat setempat, serta stakeholder terkait lainnya.

1.7.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini dibatasi pada empat wilayah yang berada pada wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Yakni Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Karangtengah dan Desa Neglasari.

Pemilihan lokasi penelitian difokuskan di empat wilayah yang terbagi dalam dua jenis klasifikasi wilayah berdasarkan data Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2009, yakni yang mewakili klasifikasi perkotaan (Kelurahan Cibadak dan Desa Karangtengah) dan perdesaan (Desa Pamuruyan dan Desa Neglasari). Adapun penentuan klasifikasi tersebut yang ditetapkan oleh BPS adalah dilihat dari sisi kepadatan penduduk dan komposisi jenis pekerjaan, yakni dimana mayoritas adalah perdagangan dan jasa untuk klasifikasi perkotaan, dan pertanian dan jasa untuk klasifikasi perdesaan. Tabel berikut adalah informasi terkait jumlah penduduk dan komposisi jenis pekerjaan pada lokasi penelitian.

Tabel 1. Informasi Wilayah Penelitian

Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Komposisi Jenis Pekerjaan
Kelurahan Cibadak	28,097	Pertanian, jasa, perdagangan
Desa Karangtengah	13,252	Pertanian, jasa, perdagangan
Desa Pamuruyan	7,351	Pertanian dan jasa
Desa Neglasari	5,632	Pertanian dan jasa

Pemilihan lokasi tersebut lebih dikarenakan peneliti beranggapan ke empat wilayah tersebut dapat menunjukkan karakteristik yang terdapat di Kecamatan Cibadak. Sedang pemilihan kecamatan dikarenakan kecamatan ini telah menjadi penerima dana PPK yang memiliki jumlah keluarga pra-sejahtera terbanyak dengan jumlah 7,805 KK dari jumlah keseluruhan sebanyak 147,076 KK (Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2009). Lebih lanjut juga dikarenakan data statistik pada tahun 2009 menyatakan ada 8,124 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30,375 orang dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Cibadak, yakni sebanyak 103,032 orang. Ini artinya ada 30 persen penduduk di kecamatan ini yang masuk kategori sebagai penduduk miskin. Adapun batas-batas Kecamatan Cibadak adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Nagrak

Selatan: Kecamatan Cikembar

Timur : Kecamatan Cicantayan
 Barat : Kecamatan Parungkuda

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa narasumber memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Adapun yang menjadi narasumber kunci yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Bappeda sebagai lembaga yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Camat Cibadak dan perangkat kecamatan
3. Kepala Desa
4. Perwakilan Masyarakat

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar para pembaca lebih mudah memahami secara keseluruhan mengenai isi dan permasalahan yang akan dibahas. Tulisan ini terdiri dari enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang: latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, hipotesis, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dipaparkan secara lebih lanjut dan mendalam mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembangunan desa, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta relevansinya dengan efektivitas pelaksanaan program pengembangan kecamatan.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sumber data, pengelompokan data, metode analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada

latar belakang individu dan kelompok secara utuh, serta pengujian keabsahan data dan teknik penafsiran data.

BAB IV. TEMUAN LAPANGAN: KEGIATAN PPK DAN IMPLEMENTASINYA

Bab ini menguraikan gambaran umum dari wilayah penelitian, serta hasil temuan lapangan dari pelaksanaan kegiatan PPK di wilayah penelitian yang diurutkan berdasarkan tahapan siklus kegiatan PPK.

BAB V. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisa dan pembahasan dari temuan lapangan, dengan menggunakan analisa SWOT, dan menguraikan alternatif solusi, serta pilihan solusi terbaik (*the best of solution*).

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian-uraian bab terdahulu dan *scenario action plan* sebagai rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang, yang dimaksudkan untuk memberi masukan perbaikan guna meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan semacam PPK.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan dan Pembangunan

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan selain sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, lelaki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lebih lanjut Bappenas juga menyatakan lemahnya partisipasi sebagai salah satu indikator kemiskinan. Berbagai kasus seperti pengusiran petani dari wilayah garapan, tiadanya jaminan kesehatan serta hak atas pendidikan bagi orang miskin menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan sekaligus pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan ini juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan atau program pembangunan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan lain yang memungkinkan keterlibatan masyarakat.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro, 1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tjokrowinoto (1995:35) berpendapat bahwa pembangunan sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan adalah merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan bersama-sama. Lebih lanjut beliau juga menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan pembangunan desa haruslah melibatkan dan dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa. Bahwa setiap perencanaan maupun

putusan untuk melaksanakan proyek pembangunan selayaknya bukan atas prioritas kekuasaan, melainkan merupakan keinginan dan keputusan bersama anggota masyarakat desa lainnya.

2.2. Pengertian Pembangunan Desa

Pada dasarnya pembangunan itu ada tiga macam yakni (1). Pembangunan Pusat, (2). Pembangunan Daerah, dan (3). Pembangunan Desa. Pembangunan Pusat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pembangunan Daerah didanai oleh anggaran pendapatan daerah (APBD). Pembangunan Desa didanai oleh APBN, APBD serta swadaya masyarakat.

Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan wilayah (geografis) dan kemampuan pemerintah masing-masing. Pembangunan tersebut harus terpadu, terarah, agar dapat mencapai sasaran dan tujuannya.

Franklyn Lisk (dalam Rustian Kamaludin, 1983:13) mengatakan bahwa:

“Dalam usaha untuk mencapai sasaran pembangunan dan strategi untuk mencapainya maka strategi pembangunan dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu: (1). Strategi konvensional yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, (2). Strategi berorientasi pada kesempatan kerja, (3). Strategi yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan dan, (4). Strategi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar”.

Jelaslah bahwa proses pembangunan membutuhkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan berbagai faktor pendukung seperti sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya alam (SDA) serta pemodalan dan teknologi. Ketiga faktor ini bersama-sama memegang peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yakni masyarakat yang adil dan makmur, serta tidak dilupakan pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Di Indonesia pembangunan desa didefinisikan sebagai *“Seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan*

mengembangkan swadaya dan gotong royong” (Ditjen Pembangunan Desa Depdagri, 1981:82).

Pembangunan desa adalah pembangunan yang meliputi seluruh kegiatan pembangunan dengan melalui proses perubahan dan pertumbuhan pembangunan desa sebagai upaya untuk mengadakan perubahan sosial, dan dilakukan dengan cara mengubah suatu masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang lebih maju.

2.3. Hakekat Pembangunan Desa

Desa merupakan tumpuan dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan terletak pada desa yakni pada dasarnya adalah suatu bentuk kehidupan kelompok-kelompok masyarakat yang perlu perubahan dan peningkatan kearah kesejahteraan yang lebih baik. Tujuan pembangunan desa pada hakekatnya adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan pada sosial ekonomi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional, sedangkan sasaran pembangunan desa adalah desa sebagai suatu kesatuan terkecil administrasi pemerintahan, suatu kesatuan ekonomi, suatu kesatuan masyarakat terkecil, dan dapat mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada. Pembangunan yang dimaksud diatas yakni pembangunan yang hendaknya lebih menekankan aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut segi sosial yang akan melahirkan suatu kondisi sosial pada tingkat yang lebih tinggi seperti masyarakat yang mandiri secara ekonomi, lebih mampu mencapai dan mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memiliki keadaan kesehatan masyarakat yang baik, dengan memprioritaskan aspek-aspek perubahan sikap dan prilaku yang menunjang pembangunan.

Koenjaraningrat (1984) menyatakan bahwa kegiatan pembangunan desa juga dapat dilakukan dengan swadaya dan gotong royong. Swadaya yang dimaksud adalah mentalitas pembangunan yang merupakan nilai-nilai budaya masyarakat desa sejak dahulu, yakni nilai-nilai budaya yang menilai tinggi usaha orang yang dapat mencapai keberhasilan sedapat mungkin adalah merupakan usaha sendiri. Sedangkan gotong royong adalah suatu bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga, serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang

bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi suatu kebutuhan insidental maupun untuk jangka panjang.

Adapun **Mubyarto (1988:41)** berpendapat bahwa pembangunan desa adalah suatu usaha proses perubahan sosial yang dilakukan dengan merubah suatu masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang lebih baik dan maju. Lebih lanjut, **Mubyarto (1988:41)** menjelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan kemampuan melalui upaya peningkatan produktifitas dengan cara memperluas kesempatan kerja, peningkatan produksi dengan intensifikasi, dan penggunaan teknologi tepat guna.
2. Pembangunan sebagai peningkatan kualitas manusia yakni peningkatan kemampuan fisik, penguasaan sumberdaya alam, penguasaan pengetahuan serta teknologi.
3. Pembangunan sebagai pengembangan kapasitas dengan perluasan partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat yang meliputi desentralisasi pembangunan, peningkatan partisipasi dan kebebasan memilih, peningkatan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan menekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik menyangkut segi sosial maupun psikologis. Pembangunan desa juga merupakan usaha untuk mendidik agar memiliki kemampuan membangun dirinya sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh desa. Sejalan dengan hal tersebut diatas, **John McKnight (1993)** mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (*community development*) hendaknya berfokus pada aset (*the gifts, skills, and capacities*), bukan semata pada kebutuhan. Untuk itu John McKnight menyatakan pentingnya suatu proses pembelajaran untuk mengetahui potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Lebih lanjut **Daly dan Cobb (1994)** juga menyatakan bahwa pemberdayaan suatu masyarakat adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus agar individu dan kelompok dalam masyarakat mampu mewujudkan suatu tindakan kolektif. Senada dengan hal ini, **Henderson dan Thomas (1987)** menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan individu dan kelompok dalam mengontrol / mengatur kondisi tempat tinggal dan bekerja, serta dampaknya terhadap kesejahteraan.

Menurut **Chekki (dalam Ndraha, 1985:30)** salah satu upaya yang menonjol dalam proses perubahan sosial adalah apa yang disebut sebagai pembangunan masyarakat yang didukung dalam suatu rumusan Perserikatan Bangsa-bangsa (**dalam Ndraha, 1983:9**) sebagai berikut:

“Community development is the processes by which the efforts of the people themselves are united which those of governmental authorities to improve the economic social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations and enable them to contribute fully to national progress”.

Dari pengertian diatas maka terkandunglah hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan masyarakat adalah upaya yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan masyarakat, yang mengintegrasikan masyarakat ke dalam suatu tata kehidupan nasional yang pada akhirnya memampukan masyarakat untuk dapat memberi sumbangsih sepenuhnya bagi kemajuan nasional.
2. Dalam upaya tersebut melibatkan dua fisik secara terpadu dan saling melengkapi yakni: (a) masyarakat yang bersangkutan yang berusaha memperbaiki kondisi untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik, (b) suatu pemerintahan yang bertujuan membangkitkan prakarsa, swadaya dan saling menolong sehingga membuat upaya tersebut menjadi lebih efektif.

Dengan adanya arahan perubahan tersebut maka akan tercipta masyarakat yang mandiri serta kreatif. Sebaliknya jika suatu masyarakat desa kurang kreatif maka memiliki kecenderungan yang mengandalkan segala sesuatunya kepada pemerintah. Herman Soewardi (1999:171) dalam penelitiannya mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang memiliki lemah karsa adalah 7 per-sepuluh, sedangkan yang memiliki kuat karsa adalah sebesar 3 per-sepuluhnya, sehingga

dengan demikian masyarakat pedesaan masih memiliki sifat bagaikan “mobil yang kurang tenaga”, belum mampu menunjukkan prakarsa atau karsa yang kuat”.

Kelancaran dalam pembangunan desa disegala sektor memerlukan adanya dukungan sarana dan prasarana pembangunan sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan, sehingga pembuatan jembatan besar, jalan raya, pengairan atau bendungan, dan sebagainya dibangun oleh pemerintah, khususnya jika masyarakat tidak mampu untuk membangunnya. **Korten (dalam Tjokrowinoto, 1999:143)** juga mengemukakan bahwa:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus difokuskan pada masyarakat itu sendiri, yang pada umumnya digerakkan oleh tokoh-tokoh informal (pemimpin informal).
2. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan yang diambil hendaknya mentoleransi keragaman lokal dan memiliki sifat yang fleksibel, yang mampu disesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Didalam melaksanakan pembangunan, pendekatan menekankan pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi proyek dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran.
5. Proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrat dan kelembagaan masyarakat, kesatuan organisasi tradisional yang mampu dan mandiri, yang merupakan suatu bagian integral dari pendekatan yang diupayakan, yakni yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.

Konsep pembangunan desa sebagaimana diuraikan tentunya membawa implikasi adanya keterlibatan masyarakat, yaitu dalam kelembagaan sosial atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk memberikan dukungan maksimal sebagai objek juga sebagai subjek pembangunan. **Hermansyah (2007)** berpendapat bahwa pembangunan desa mesti didasarkan pada perspektif orang desa, pada karakter-karakter sosial budaya dan sikap-sikap hidup masyarakat desa yang sesungguhnya khas. Senada dengan hal ini, **Tjokrowinoto (1999:35)** mengatakan bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan memfokuskan pada tiga azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral yakni dimana pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa, (2) azas kekuatan sendiri yakni setiap usaha haruslah didasarkan pada kekuatan sendiri, dan (3) azas mufakat dimana pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan bukan merupakan prioritas pemimpin semata, tetapi merupakan keputusan bersama setiap anggota masyarakat desa. Lebih lanjut **Saul M. Katz (dalam Supriatna, 1985:16)** mengatakan bahwa:

“Pembangunan desa sebagai proses dan gerakan perubahan sistem sosial harus memperhatikan input (masukan) berupa keinginan atau permintaan (nilai-nilai), tuntutan/kebutuhan, pemecahan masalah, sumber-sumber (uang dan energi), dan dukungan (kewenangan yang sah)”.

Dari beberapa pengertian tentang hakekat pembangunan desa, penulis sependapat dan mengacu kepada konsep Chekki. Penulis meyakini bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencapai masa depan mereka, dimana didalam prosesnya masyarakat menginginkan untuk dapat saling berpartisipasi. Dengan demikian, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan partisipasi masyarakat.

2.4.Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Prinsip masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, juga dijabarkan melalui pengembangan inisiatif dan kreatifitas masyarakat yang

dilaksanakan bersama dalam suatu pengembangan partisipasi masyarakat. **Uphoff (dalam Kaho, 1995:115)** mengatakan bahwa:

“Partisipasi pembangunan dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan”.

Dalam kaitannya dengan kontribusi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan, **Putnam (1995)** mengatakan bahwa kontribusi semacam ini adalah merupakan sumberdaya sosial (*social / community capital*) non fisik yang ada didalam masyarakat yang dapat digunakan sebagai modal dalam pengembangan masyarakat. Lebih lanjut Putnam menyatakan bahwa modal sosial atau *community capital* mengacu kepada aspek-aspek utama organisasi sosial (*trust, norms and networks*) yang dapat meningkatkan efisiensi dalam masyarakat, dan modal sosial ini dapat dibangun jika setiap individu belajar dan mempercayai individu lainnya untuk membangun tanggung jawab dan komitmen). Senada dengan hal ini, **Ridel (1997)** juga turut menegaskan bahwa modal sosial adalah berupa kepercayaan (*trust*), norma (*norms*), dan jejaring (*networks*). **Lesser (2000)** menyatakan bahwa modal sosial penting bagi suatu masyarakat karena mempermudah akses informasi bagi anggota komunitas, menjadi media *power sharing*, mengembangkan solidaritas, memobilisasi sumberdaya komunitas untuk pencapaian bersama, dan membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi.

Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memberikan kontribusi dengan maksud dan tujuan yakni untuk mencapai tujuan kelompok. Masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan inisiatif dan kreatifitas yang ada dalam pola pikir dan mata hati mereka yang akan disampaikan dalam suatu musyawarah masyarakat desa, atau biasa disebut sebagai “Rapat Desa”.

Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi pelaksanaan pembangunan sudah merupakan kewajiban, karena pada prinsipnya semua warga masyarakat merupakan hak untuk mengeluarkan pendapat-pendapat dan ide-ide yang riil

dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat ikut merasakan memikul beban pembangunan dan mensukseskan jalannya pembangunan. Dalam kaitan ini Thoha (1995:4-5) mengemukakan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu proses yang harus dimulai dari saat merancang, konstruksi, melaksanakan, sampai pada saat mengevaluasi”.

2.4.2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat sangat sulit ditentukan, masing-masing pakar saling berbeda mengartikan bentuk partisipasi masyarakat. Dalam bab ini penulis mengambil pendapat yakni dari Kaho (1995:114) yang mengemukakan bahwa: “partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yakni:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (perencanaan), yakni dimana masyarakat dilibatkan mulai sejak dari awal guna membangun rasa kepemilikan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang direncanakan. Masyarakat sendiri yang menentukan dan memutuskan program-program atau kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan yang menjadi prioritas dan kebutuhan mereka.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, yakni masyarakat turut serta dalam tahapan pelaksanaan kegiatan / pembangunan bersama-sama pihak terkait lainnya, dan sekaligus berperan dalam setiap penanganan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan / pembangunan.
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yakni karena masyarakat yang menentukan arah dan prioritas pembangunan, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampak dan manfaat dari kegiatan / pembangunan yang telah berjalan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
4. Partisipasi dalam mengevaluasi, yakni masyarakat turut serta dalam mengukur dan menilai apakah kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan membawa manfaat dalam pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, dan termasuk menentukan apakah diteruskan atau sebaiknya dirubah arah atau justru dihentikan jika memang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Jelaslah bahwa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diikutsertakan mulai sejak awal, sehingga masyarakat dapat menentukan pembangunan seperti apa yang akan dibuat, dan apakah pembangunan tersebut nantinya membawa manfaat untuk jangka panjang bagi kehidupan mereka. Tentunya kesemua ini harus dilakukan dalam suatu musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa serta perangkat desa lainnya, anggota LKMD, tokoh masyarakat, karang taruna atau organisasi masyarakat desa lainnya, serta masyarakat. Hasil rapat nantinya dicatat dalam suatu dokumen notulensi rapat, dan hasilnya akan ditentukan melalui suatu keputusan bersama. Senada dengan hal ini, **Bintoro (1995)** menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pembangunan pada prinsipnya merupakan tahapan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak tentang rencana yang dilakukan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat program, sehingga masyarakat juga dapat diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam pelaksanaan sekaligus melakukan pengawasan guna mencapai keberhasilan pembangunan sesuai tujuan yang telah direncanakan. Pendapat serupa tertuang dalam pertanyaan **M. Nasroen (dalam Asal Mula Negara 1957:154)** yang menyatakan bahwa:

“Akibat dari keputusan menurut sistem suara terbanyak, ialah bahwa menang, maka keputusan suara terbanyak dipaksakan menerimanya terhadap suara yang kalah. Dan dalam praktek, melaksanakan keputusan yang demikian jelaslah bahwa yang kalah tidak akan dengan ikhlas mematuhinya. Apalagi membantunya, sedangkan dalam sistem sepakat golongan suara yang terkecil turut mengakui pendapat suara terbanyak dan mereka malahan turut menyetujuinya dan yang demikian ini mengakibatkan bahwa golongan kecil ini, dalam praktek pelaksanaan keputusan ini akan membantu dengan ikhlas keputusan bersama itu”.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pembangunan, Bryant dan White (1987:268) menyatakan bahwa:

“Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya yang lebih baik mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses, artinya masyarakat yang perlu turut berperan serta”.

Namun ada pandangan berbeda dengan Davis (**dalam Sastropetro, 1986:16**) mengenai bentuk dan jenis partisipasi masyarakat, yang menyatakan bahwa:

1. Bentuk partisipasi, yakni:

- a) Konsultasi jasa, yakni dimana masyarakat hanya sekedar dimintakan keterlibatannya berupa penyediaan bantuan sekedar berupa pendapat, atau tenaga, tanpa dilibatkan secara utuh (*holistic*).
- b) Sumbangan spontan dalam bentuk barang dan jasa, yakni dimana masyarakat berpartisipasi hanya dalam kurun waktu tertentu dan juga tidak secara keseluruhan, dengan menyediakan beberapa bentuk bantuannya berupa barang (peralatan pembangunan ala kadar, semen, batu, dan sebagainya) dan jasa (tenaga, waktu, pendapat).
- c) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan industry/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu.
- d) Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunikasi (rapat desa).
- e) Sumbangan dalam bentuk kerja biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f) Mengadakan pembangunan di kalangan sendiri

2. Jenis-jenis partisipasi:

- a) Pikiran (*psychological participation*) yakni berupa bentuk partisipasi dalam bentuk memberikan sumbangan pikiran baik berupa ide, pendapat, ataupun analisa.
- b) Tenaga (*physical participation*), yakni dimana partisipasi diberikan dalam bentuk penyediaan waktu dan tenaga, misalnya turut bekerja membantu mengerjakan suatu kegiatan.

- c) Pikiran dan tenaga (psychological and physical participation), yakni berupa gabungan antara keterlibatan dalam memberikan ide, pendapat, ataupun analisa situasi dan turut mengerjakan dalam hal penyediaan tenaga.
- d) Keahlian (participation with skill), yakni berupa keterlibatan dengan menyediakan keahlian tertentu, misalnya dalam turut serta dalam melakukan rancangan anggaran suatu pembangunan, membangun suatu pengerjaan dan sebagainya yang memerlukan adanya suatu keahlian tertentu.
- e) Barang (material participation), yakni dimana masyarakat dilibatkan untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan sejumlah barang tertentu yang dibutuhkan dalam pengerjaan kegiatan / proyek pembangunan.
- f) Uang (money participation), yakni dimana masyarakat dilibatkan untuk turut berpartisipasi dengan menyediakan dukungan sejumlah dana tertentu baik atas kerelaan ataupun jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Maka jelaslah apa yang dikatakan oleh **Davis (dalam Sastropetro 1986:16)** bahwa bentuk dan jenis partisipasi masyarakat itu sangat berguna sekali dalam pelaksanaan program pembangunan, pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa, yakni diperlukan adanya dukungan dari masyarakat melalui partisipasi. Partisipasi masyarakat bukan saja memberikan sumbangan berupa material, tetapi juga dapat berbentuk sumbangan pikiran atau pendapat-pendapat yang dapat menjadi suatu sumbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Senada dengan itu **Ndraha (1983:82)** juga memberikan pandangan tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain:

1. Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungannya dengan pembangunan desa seperti jasa/tenaga, bahan dan uang.

2. Partisipasi dalam bentuk penerimaan dan pemberitaan informasi, yakni dalam hubungannya dengan peran serta mensosialisasikan program pembangunan yang akan atau sedang dijalankan.
3. Partisipasi dalam bentuk memiliki pembangunan, yakni dimana masyarakat telah menyadari peran sertanya dalam pembangunan dan telah turut bersama merencanakan pembangunan berdasarkan prioritas dan kebutuhan bersama, maka juga akan turut bersama-sama mengawal pelaksanaan kegiatan / pembangunan yang berjalan.
4. Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan, yakni dimana masyarakat secara kolektif bersama-sama turut melakukan pengkajian dan penilaian dari setiap tahapan program pembangunan yang berjalan agar tetap sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan.

2.4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Setiap pembangunan yang akan dilaksanakan pada dasarnya adalah tanggung-jawab bersama yaitu masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini masyarakat sebagai pengelola dan memelihara, sedangkan Pemerintah sebagai pihak yang membantu (pendanaan) dan mendorong terlaksananya pembangunan. Oleh sebab itu untuk kelancaran pelaksanaan program pengembangan kecamatan (PPK) yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi, baik dalam pengambilan keputusan maupun gagasan-gagasan yang dapat mendorong keberhasilan program tersebut.

Peran serta masyarakat dalam berpartisipasi adalah merupakan keterlibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah disepakati bersama, dengan demikian partisipasi menuntut keterlibatan penuh dari para pelakunya (Aryenti, dkk. dalam *Jurnal Penelitian Permukiman*, 2000:33). Senada dengan itu Koentjaraningrat (1974:80) mengemukakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan, disini semua potensi manusia (tenaga,

ketrampilan serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui swadaya maupun gotong-royong, maupun sumbangan sukarela”.

Dalam usaha tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur diperlukan suatu keadaan dimana pembangunan itu dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Lebih lanjut Koentjaraningrat berpendapat bahwa partisipasi masyarakat akan menjamin proses adaptasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam pembangunan itu sendiri, sehingga dapat mengubah kedudukannya sebagai objek menjadi subjek. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dibedakan menurut mekanisme partisipasi yaitu dibidang perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan tentang:

1. Apa yang akan dibangun dalam program yang ada sekarang ini
2. Untuk kepentingan apa pembangunan itu dilaksanakan
3. Darimana sumber dananya
4. Kapan pembangunan itu dimulai
5. Siapa-siapa yang terlibat dalam pembangunan itu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada pengertian partisipasi masyarakat dari Koentjaraningrat dimana partisipasi dalam pembangunan membutuhkan sumberdaya yang cukup seperti dana, material dan tenaga kerja yang tersedia. Dana dan material perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat yang ada di desa. Sedangkan tenaga kerja disesuaikan dengan ketrampilan masyarakat yang ada, misalnya tukang kayu, tukang semen, dan lain-lain. Apabila tenaga teknis tersedia maka menjamin pembangunan desa dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian maka pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dilakukan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat yakni dalam menikmati dan mengembangkan apa yang telah berhasil dicapai atau dilaksanakan. Bahkan dalam hal pengawasan, masyarakat juga diikutsertakan dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan sampai dapat dimanfaatkan, sehingga pada akhirnya akan membawa dampak positif terhadap jalannya pembangunan.

2.5. Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

2.5.1. Pengertian Efektivitas

Dalam pengertian dan pembahasan efektivitas tidak terlepas dari tujuan organisasi. Efektivitas adalah merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi, karena mampu memberikan suatu gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan. **Devas, dkk (1989:279-280)** mengatakan bahwa pengertian efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari suatu organisasi. Lebih lanjut Devas juga berpendapat bahwa efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Namun demikian mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang mudah, banyak organisasi yang berukuran besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda-beda. Menurut **Makmur (1994:81-82)** dalam mengukur efektivitas menggunakan tiga pendekatan yaitu:

“Pertama, ...pendekatan sasaran (*goal approach*), pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Kedua, ...pendekatan sumber (*system resource approach*) mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Dan ketiga...melalui pendekatan proses (*process approach*), melihat kegiatan internal organisasi, dan mengukur efektivitas melalui berbagai indikator internal seperti efisiensi ataupun iklim organisasi”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan ini mencoba mengukur efektivitas sejauhmana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Dalam pendekatan ini **Makmur (1994:83-84)** juga

menyatakan beberapa kelemahan dalam mengukur efektivitas dengan menggunakan pendekatan sasaran:

1. Adanya macam-macam output yang dihasilkan menyebabkan pengukuran efektivitas yang tinggi pada suatu sasaran seringkali disertai dengan efektivitas yang rendah pada sasaran lainnya.
2. Adanya subjektivitas dalam penilaian, karena subjektivitas para pemimpin aka berpengaruh terhadap informasi yang mereka berikan mengenai sasaran organisasi.
3. Pengaruh kontekstual, lingkungan dan keseluruhan elemen-elemen kontekstual berpengaruh terhadap performansi organisasi.

Dalam kaitannya dengan organisasi, ada banyak terdapat berbagai pandangan dan pendapat-pendapat yang berbeda dalam meninjau organisasi, seperti misalnya pendapat **Robbins (1994:37)** mengemukakan bahwa pendekatan teori organisasi dapat dilihat dalam empat tipe teoritis yaitu: pendekatan klasik, pendekatan neoklasik, pendekatan modern dan pendekatan mutakhir.

Pendekatan Klasik diilhami oleh konsep Taylor yang mengajarkan bahwa dalam suatu organisasi, perlu diadakan pembatasan secara tegas antara kegiatan pelaksanaan atau operasional dengan tugas managerial. Seorang operator mesin hanya bertugas sebagai pelaksana pengoperasian mesin, sementara tugas untuk merencanakan metode kerja, maka pengorganisasian selalu dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini dimaksud agar kedua kelompok karyawan menjadi lebih ahli dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Pendekatan Neoklasik muncul sebagai akibat serangkaian percobaan yang dilakukan oleh **Elton Mayo**, disebut juga sebagai pendekatan *human-relation* karena perhatiannya terpusat pada aspek hubungan antar manusia dalam organisasi. Menurut **Elton Mayo** ada beberapa prinsip pendekatan Neoklasik ini antara lain adalah:

- Organisasi sebagai suatu sistem sosial dimana hubungan antara anggotanya adalah merupakan interaksi sosial

- Interaksi sosial itu menyebabkan munculnya kelompok non-formal dalam organisasi yang memiliki norma sendiri dan berlaku serta menjadi pegangan bagi seluruh anggota kelompok
- Interaksi sosial perlu diarahkan agar pengaruhnya positif bagi prestasi individu dan kelompok
- Kelompok non-formal dapat mempunyai tujuan yang berbeda dengan kepentingan organisasi. Oleh karena itu kepemimpinan yang hanya memperhatikan struktur formal perlu dilengkapi dengan perhatian terhadap aspek psikososial pekerja agar tujuan kelompok non-formal tersebut dapat diarahkan sesuai dengan kepentingan organisasi. Untuk itu manajemen perlu mempunyai ketrampilan teknis agar mampu membina munculnya ikatan sosial yang baik dalam organisasi (**Amini Maros, 2000:30**).

Pendekatan Modern menyatakan bahwa yang dimiliki saat ini bukan teori mengenai organisasi, tetapi *Why of Thinking*, atau cara berpikir mengenai organisasi, cara melihat dan menganalisa secara lebih tepat dan mendalam yang dilakukan melalui keteraturan dan regularitas perilaku organisasi. Untuk itu ada dua cara adaptasi yang dilakukan organisasi yaitu: pertama, melalui perubahan internal organisasi, pola kerja, perencanaan dan aspek internal lainnya terhadap karakteristik lingkungan. Kedua adalah berusaha untuk menguasai dan mengubah kondisi lingkungan menjadi menguntungkan organisasi.

Pendekatan Mutakhir memusatkan perhatian pada sifat politis organisasi. Posisi ini mula-mula dibuat oleh **James March dan Herbert Simon**, serta diperbaiki oleh **Jeffrey Pfeffer**. Ia menciptakan model teori organisasi yang mencakup kualifikasi kekuasaan, konflik inheren atas tujuan, serta keputusan desain organisasi yang mendukung kepentingan pribadi dari penguasa selanjutnya bahwa kendali organisasi menjadi tujuan ketimbang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Organisasi harus menilai preferensi dan kepentingan dari mereka yang berada didalam organisasi yang mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan perspektif politik yang dibangun berdasarkan pengetahuan tentang pengambilan keputusan berdasarkan perilaku dan ilmu politik, telah

meningkatkan kemampuan kita untuk menjelaskan fenomena-fenomena organisasi.

Ndraha (2000:350-351) mengemukakan bahwa lima hal tentang pentingnya tujuan organisasi yaitu:

“Pertama, ... pada gilirannya hal ini membantu untuk mengidentifikasi hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungannya. Kedua, ... pada gilirannya hal ini memudahkan organisasi merekrut dan menggali sumberdaya dari lingkungan. Dalam hubungan ini, tujuan organisasional yang sehat membangun citra organisasi di mata masyarakat dan citra masyarakat terhadap organisasi. Ketiga, ...tujuan organisasi juga berfungsi sebagai norma, pegangan, tolak-ukur, sehingga setiap penyimpangan sekecil apapun, segera dapat terlihat dan dikoreksi. Keempat,berfungsi sebagai tolak-ukur kinerja organisasi, alat ukur buat kontrol dan evaluasi kinerja organisasi. Kelima,... mendorong setiap orang untuk bekerja sekeras-kerasnya dan berusaha sebisa-bisanya, sehingga produktivitas kerja setinggi-tingginya”.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimana diperlukan rencana dan tujuan yang jelas, sebagaimana disampaikan oleh **Djoko Winarso (1995:74)**, yang juga menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana sebagai patokan dalam pelaksanaan program yang didalamnya juga meliputi norma dan aturan yang memadai. Winarso berpendapat bahwa dalam organisasi dimana terdiri dari individu dan kelompok dan oleh karena itu efektivitas juga terdiri dari efektivitas individu dan kelompok, namun demikian meyakini bahwa meskipun efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok, akan tetapi efektivitas organisasi lebih banyak dari jumlah efektivitas individu dan kelompok.

Maka penulis berpendapat bahwa tujuan organisasi lebih tinggi ketimbang tujuan kelompok atau pribadi, juga lebih tinggi ketimbang pengurus atau penguasa organisasi. Senada dengan hal ini **Ndraha, 2000:351** juga menyatakan

bahwa tujuan organisasi harus dihormati dan ditaati oleh seluruh warga organisasi. Lebih lanjut Ndraha juga merumuskan efektivitas sebagai berikut:

“...mengingat semakin terbatasnya alat pemenuh atau pemuas kebutuhan dan semakin banyaknya jumlah penduduk bumi, manusia harus berusaha semakin rasional...efektivitas ditunjukkan oleh perbandingan antara realisasi (*R*) dengan target (*T*). Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{R}{T}$$

Hal tersebut diatas kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh **John P Burns (dalam Ryass Rasyid, 1997:27)** bahwa efektivitas bukan hanya sekedar berarti kemampuan organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya, akan tetapi berkenaan dengan *innovitiveness, adaptability, organization learning and the capacity to manage change*.

2.5.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera baik lahir maupun batin. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut dan salah satunya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini menjadi perhatian pemerintah dan segenap masyarakat sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan sebagai dampak dari krisis ekonomi, yang menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.

Kondisi diatas sesungguhnya menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dibangun selama ini ternyata terbukti hanya menghasilkan ekonomi gelembung atau *buble economy*, yang mengandung pengertian mudah menjadi besar tetapi juga sangat mudah pecah (**Eko Aristanto, dalam Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial UNPAD, 2001:225**). Kondisi tersebut berdampak terhadap merosotnya kegiatan ekonomi baik dipertanian maupun dipedesaan dan akhirnya

terjadi penurunan kualitas hidup, disamping itu juga telah mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan menyebabkan jumlah penduduk miskin membengkak.

Dalam hal ini, **David Osborne dan Ted Gaebler (1996)** mengemukakan bahwa paradigma pembangunan sektor pemerintah yaitu: “*Community Owned Government Empowering Rather Than Serving*”, yakni suatu gagasan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu untuk mengurus kepentingan sendiri dan memecahkan masyarakat sendiri. Dalam hal ini sependapat juga dengan apa yang dikatakan oleh **Ndraha (dalam Kybernologi I, 2000:65)** bahwa:

“Pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau konflik dan tidak boleh menolak untuk mendengarkan tuntutan setiap warga masyarakat dengan alasan apapun. Setiap masalah harus dapat diselesaikan sedini mungkin, seterbuka mungkin dan setuntas mungkin”.

Munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu **Pranarka (1996:56-57)** mengatakan konsep ini menampakkan dua kecenderungan sebagai berikut:

“Pertama, ...pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya, proses ini disebut kecenderungan primer. Kedua, ...kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya”.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat perlu melakukan pendekatan yang sifatnya kontekstual artinya setiap program yang akan dilaksanakan didasarkan pada karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing

daerah yang bersangkutan. Potensi yang dimaksud baik yang menyangkut keadaan fisik-alamiah maupun sosial ekonomi yang sosial budaya setempat (Maman P Rukmana dan A. Djadja Saefullah, dalam *Jurnal Pengabdian LPKM, UNPAD, 1997:8*). Lebih lanjut Ginanjar Kartasasmita (1996:145) mengemukakan bahwa: “Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Kieffer (dalam Priyono dan Pranarka, 1996:72) bahwa:

“Empowering is an interactive and highly subjective relationship of individual and their environment, it demands innovation in qualitative / ethnographic methodology and special strategy to capture the intense experience of human struggle and transformation”.

Lebih lanjut Ginanjar K. (1996:160) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dalam hal yang menjadi titik tolak adalah pengenalan bahwa sebagai manusia setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.
3. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang utama adalah meningkatkan taraf pendidikan yang sederajat.

Sedarmayanti (1999:80) berpendapat bahwa dengan adanya pemberdayaan akan mampu mendorong terjadinya inisiatif dan respon masyarakat, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat dan fleksibel. Lebih lanjut Sedarmanti menyatakan bahwa kegiatan yang lebih nyata dari tekad Pemerintah untuk memberdayakan pemerintah daerah, yaitu mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berupa Program Jaringan Pengamanan Sosial (PJPS) dalam bentuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hendaknya seluruhnya diberikan kewenangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kepada daerah dan masyarakat, artinya pembangunan yang diberikan dimulai dari bawah (bottom up).

Pada penulisan ini, penulis mengacu pada teori diatas dan sependapat dengan konsep dari Sedarmayanti dikarenakan pemberdayaan yang bersifat bottom up mampu membuat dan menciptakan keterlibatan masyarakat secara lebih optimal. Masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap program pembangunan, sehingga memiliki keinginan untuk berperan secara aktif dalam proses pembangunan, dan pada akhirnya diharapkan memiliki tanggungjawab dalam melestarikan pembangunan yang telah tersedia.

2.5.3. Krisis Ekonomi

Program PPK kelahirannya didasari oleh krisis ekonomi yang terjadi dan menimpa Indonesia di tahun 1997. Keterpurukan Indonesia saat itu tidak bisa dipungkiri lagi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan yang membuat nilai tukar terhadap dollar AS melemah, sehingga nilai jual bahan pokok di pasar melonjak tinggi. Semenjak krisis ekonomi, banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Dampak dari krisis ini, kriminal meningkat tajam dan beragam masalah sosial bermunculan. Beberapa penyebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia menurut **Mubyarto (1998:2)** antara lain adalah:

1. Terlalu berpikir global dan keramahannya, serta terlalu mengabaikan ekonomi rakyat. Saat itu Indonesia terlalu mengutamakan industri besar dan melupakan pentingnya ekonomi berbasis kerakyatan.

2. Terlalu individualistik atau memikirkan kepentingan sendiri, serta tidak melihat adanya kesenjangan sosial yang terjadi dan perkembangan masyarakat
3. Terlalu percaya pada pasar, lupa bahwa dalam pasar yang liberal, yang kecil/gurem pasti kalah dan yang kuat pasti menang
4. Terlalu meremehkan ideologi, menganggap bahwa Indonesia sama saja dengan negara lain dan tidak memiliki ekonomi Pancasila
5. Terlalu mendewakan keserasian keseimbangan dan keselarasan, sehingga saat konflik terjadi lebih disembunyikan
6. Terlalu berpihak pada konglomerat, ekonomi rakyat ditelantarkan
7. Terlalu meremehkan sistem ekonomi, sehingga mengakibatkan kebijaksanaan pemerintah tidak konsisten, pemerintah tidak punya visi dan misi yang jauh kedepan
8. Pemerintah terlalu sentralistik, daerah tidak bergairah membangun daerahnya dengan cara sendiri

Selanjutnya dikatakan bahwa krisis ekonomi muncul karena kebijakan pemerintah Orde Baru yang terlalu berpihak kepada ekonomi golongan konglomerat yang hanya mengejar pertumbuhan dan menyimpangkan ekonomi kerakyatan. Untuk itu **Mubyarto** telah mengembangkan konsep “*Reformasi Sistem Ekonomi dari Konglomerat yang Kapitalistik Menuju Ekonomi Kerakyatan*”. Prioritas usaha ekonomi ini adalah industri berbasis pertanian (argo-based industry), karena rakyat sebagian besar berada dipedesaan sehingga usaha kecil yang tepat adalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan usaha kecil lainnya.

Menurut **Erwidodo** bahwa “Industri ini umumnya padat kerja dan sekaligus menyediakan lapangan kerja” kompatibel dengan kondisi sumberdaya manusia masyarakat pedesaan (**dalam Basri, 1999:21**). Dengan demikian pemberian modal usaha produkti dari Program PPK adalah salah satu jawaban yang tepat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui kegiatan industri pertanian.

2.5.4. Masyarakat Miskin dan Masyarakat Terkena Dampak Krisis Ekonomi

Guna mengatasi masalah masyarakat miskin, khususnya yang diakibatkan sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berlangsung di tahun 1997, Pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan, namun masih belum menghasilkan kemajuan yang menggembirakan. Kemiskinan menjadi semakin parah pada saat Indonesia dilanda Krisis Ekonomi ditahun 1997, masyarakat miskin menjadi semakin bertambah, sedangkan untuk lapangan pekerjaan menjadi semakin sempit. Lapangan pekerjaan di perkotaan seperti dipabrik bahkan juga di lahan pertanian di pedesaan sudah semakin sempit, semakin masyarakat turut membutuhkannya.

Oleh karena ketimpangan tersebut, lahan pertanian sebagai sumber penghasilan mayoritas masyarakat, terutama yang tinggal didaerah pedesaan menjadi berkurang. Ketimpangan ini mengakibatkan kecenderungan terjadinya dua kelompok masyarakat tani yang berbeda secara ekstrim, menurut pendapat **Maman P. Rukmana dan A.Djadja Saefullah (dalam Jurnal Pengabdian LPKM, UNPAD, 1997:6)** yang mengatakan bahwa:

“Kelompok pertama adalah petani kaya yang menguasai modal sehingga dengan sendirinya akan mampu menguasai pasar dan mengakumulasi modalnya melalui penguasaan tanah. Kelompok kedua adalah petani miskin yang karena tidak memiliki modal terpaksa melepaskan tanahnya yang sudah sempit dan menjadi buruh tani atau penggarap yang kehidupannya bergantung pada petani kaya”.

Oleh karena itu perlu penanganan secara terpadu dengan instansi yang terkait, sehingga kebutuhan pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok akan dapat diatasi secara bertahap. **Andre Bayo Ala (1996:6)** mengatakan bahwa:

“Terdapat sepuluh dimensi atau aspek kemiskinan, yakni miskin dalam hal kekuasaan, harta benda atau harta kekayaan, kesehatan, pendidikan dan

pengetahuan, ketrampilan atau keahlian, cinta kasih atau afeksi, keadilan, penghargaan atau penghormatan, keamanan dan kebebasan”.

Selanjutnya **Chambers, 1988** mengatakan bahwa: *“dalam hidupnya orang miskin dipacu oleh tuntutan dan desakan untuk dapat bertahan hidup, artinya ada yang dimakan, tidak jatuh sakit atau tertimpa kekecewaan”.* Lebih lanjut **Endang Sulistyowati (dalam Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2002:236)** mengatakan: *“kebanyakan masyarakat desa, baik pria maupun wanita harus bekerja apa saja untuk dapat bertahan hidup”.*

Emil Salim (dalam Andre Bayo Ala, 1996:8-9) memberikan penjelasan bahwa orang miskin memiliki lima ciri, yaitu:

1. Orang miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Orang miskin tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri, pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha, sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit perbankan, seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain, sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada tengkulak / lintah darat yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga yang tinggi.
3. Tingkat pendidikan yang rendah, kebanyakan tidak tamat sekolah dasar (SD). Waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar, juga anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah karena harus membantu orangtua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik di rumah, sehingga secara turun-menurun mereka terjatuh dalam keterbelakangan dibawah garis kemiskinan ini.
4. Kebanyakan orang miskin tinggal dipedesaan, banyak diantara mereka yang memiliki tanah meski kebanyakan berupa lahan kecil. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar pertanian karena pertanian adalah pekerjaan musiman sehingga kesinambungan bekerja menjadi kurang

terjamin, hal ini menyebabkan kebanyakan mereka menjadi *self-employed* atau pekerja lepasan. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka dibawah garis kemiskinan dan oleh karena didorong kesulitan hidup didesa, maka banyak diantara mereka yang kemudian memutuskan untuk pindah ke kota (urbanisasi).

5. Banyak diantara orang miskin yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai ketrampilan atau pendidikan yang cukup, sementara negara tidak mampu menampung atau mengatasi ledakan urbanisasi penduduk desa. Sementara di banyak negara maju, pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik masyarakat untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang seperti Indonesia, tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industri, sehingga pada akhirnya orang miskin yang pindah ke kota menjadi terdampar dalam kantong-kantong kemelaratan (*slumps*).

Hal senada juga diungkapkan oleh **Ginanjar Kartasasmita (1996:240-241)** bahwa kondisi kemiskinan bermula dari:

1. Rendahnya taraf pendidikan yang mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang ada. Taraf pendidikan yang rendah ini mengakibatkan terbatasnya kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
2. Rendahnya derajat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.
3. Terbatasnya lapangan kerja, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
4. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin yang secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi, mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerakan kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Jadi ke-empat macam uraian diatas menunjukkan bahwa lingkaran kemiskinan itu berada pada pendidikan dan kesehatan yang rendah. Disamping itu mereka juga bertempat tinggal jauh dari jangkauan pelayanan pemerintah. Maka untuk menanggulangi kemiskinan penduduk, Ginanjar Kartasasmita (1996:241) mengatakan ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu:

“Pertama, ...kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap usaha penanggulangan kemiskinan. Kedua, ...kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat penghasilan rendah. Dan ketiga, ...kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas upaya untuk menanggulangi kemiskinan”.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong 2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (Moleong 2006:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Nazir (1983) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara tepat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reabilitas. Analisnya dikerjakan berdasarkan *ex post facto*, yakni data dikumpulkan setelah semua kejadian berlangsung (Nazir, 1983:103). Lebih lanjut Nazir menyatakan bahwa metode kualitatif atau deskriptif pada umumnya memiliki dua ciri khas utama yakni: (1) memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada; (2) data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisa, oleh karena itu metode ini sering disebut metode analisa. Adapun yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu atau menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini diarahkan pada latar, individu dan kelompok secara utuh, dalam

rangka menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sebagai alasan penulis dalam menggunakan metodologi kualitatif adalah dikarenakan metode ini dipandang cukup menggunakan bentuk hipotesa kerja yang lebih mudah disesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan, dan secara langsung hubungan peneliti dengan responden terjadi saling penyesuaian dan perubahan dalam pola-pola nilai yang berlaku. Menurut **Grossberg, dkk. 1992 (dalam Judistira 2000:77)** mengemukakan bahwa:

“Qualitative reseach embraces two tension at the same time. On one hand, if its drawn to broad, interpretative, post-modern, feminist, and critical sensibility. On the other hand, it is drawn to more narrowly defined positivist conceptions of human experience and its analysisist”.

(Yang artinya: bahwa penelitian kualitatif mencakup dua hal yang tarik menarik pada saat yang bersamaan. Disatu sisi, jika yang ditarik secara luas, cara mengintepretasi, pasca modernitas, feminis dan kritis. Sementara disisi lain, jika ditarik ke konsep positif yang lebih sempit didefinisikan dari pengalaman manusia dan analisisnya).

Secara singkat peneliti berpendapat bahwa melalui metode kualitatif yang menekankan pada konstruksi dari hakekat realitas secara sosial, hubungan dekat antara peneliti dengan apa yang dipelajari, dan kecenderungan situasional yang dapat menajamkan kajian. **Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000:3)** juga mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dengan demikian, penulis berharap dapat mengetahui secara mendalam tentang kegiatan pelaksanaan PPK di Kabupaten Sukabumi. Mengapa peranan partisipasi masyarakat masih lemah dan bagaimana masyarakat meningkatkan efektivitas melalui partisipasi. Disamping itu penulis juga berkeinginan untuk mengetahui secara mendalam kegiatan dalam penyusunan program atau

pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat, sementara jika keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat merupakan keputusan yang diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder
 - a) Keadaan geografis dan demografis Kabupaten Sukabumi
 - b) Keadaan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi
 - c) Keadaan kondisi sosial ekonomi masyarakat
 - d) Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran
 - e) Mekanisme pelaksanaan PPK, yaitu penggunaan dana, pengelolaan dana, objek penerima bantuan, sumberdaya manusia dan fungsi pengawasan
 - f) Pengaduan masyarakat terhadap proses program yang tidak sesuai dengan manfaat hasil kegiatan tersebut
2. Data Primer
 - a) Sikap aparat pemerintah dalam menanggapi kritik dari masyarakat tentang proses kegiatan PPK
 - b) Dalam proses kegiatan PPK apakah sudah sesuai dengan prosedur dan nilai-nilai budaya masyarakat dan lingkungan
 - c) Keluhan masyarakat terhadap proses kegiatan PPK, disampaikan secara tertulis atau lisan kepada petugas PPK
 - d) Kegiatan PPK yang diselenggarakan, apakah sudah sesuai dengan rencana kerja atau belum
 - e) Kegiatan PPK apakah sudah sesuai dengan tujuan pemerintah

3.3. Sumber Data

Sumber data berupa kata-kata dan tindakan daripada informan yang didukung dengan dokumen berupa naskah-naskah, seperti data tertulis dan photo.

Didalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data yang didapat menjadi beberapa kelompok, yakni:

1. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan kelompok sasaran dalam program pengembangan kecamatan, yaitu masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan dalam pelaksanaan dipedesaan.
2. Peneliti menentukan kelompok sasaran dalam pengambilan kebijakan atau orang yang membuat kebijakan yaitu: Ketua Bappeda, Kepala Kantor PMD, Camat, Kepala Desa, Anggota LKMD, dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.
3. Perpustakaan sebagai sumber data dalam bentuk buku, karya tulis ilmiah (thesis dan disertasi) dan jurnal.
4. Dokumen selain dari perpustakaan, peneliti juga mengambil data-data dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang timbul seperti photo, peraturan pemerintah, surat keputusan, data BPS dan sebagainya.

3.4. Latar dan Lapangan Penelitian

Latar (*setting*) penelitian ini adalah dimana peneliti mengobservasi dan mengadakan wawancara langsung terhadap informan tersebut diatas, dengan diadakannya *setting* tersebut, maka peneliti mendapatkan informasi tentang permasalahan yang ada.

3.5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian disini dimaksudkan sebagai alat mengumpulkan data (Moleong, 2000:121). Lebih lanjut Moleong (2000:134) mengatakan bahwa: "*pengumpulan data dilapangan dengan memanfaatkan pengamatan bisa efektif, tetapi pengamat sendiri haruslah berhati-hati mememanfaatkannya. Disamping pengamatan masih ada teknik lainnya yaitu wawancara*". Senada dengan itu Judistira K. Garna (1999:33) mengatakan:

"Instrumen penelitian adalah manusia itu sendiri, artinya peneliti terlebih dahulu perlu sepenuhnya memahami dan bersikap adaptif terhadap situasi sosial yang dihadapi dalam kegiatan penelitian itu".

W.T.Whyte, 1995 (dalam Koentjaraningrat, 1981:147) mengatakan bahwa:

“Peneliti yang mengumpulkan keterangan yang diperlukannya dengan cara mengamati sasaran penelitiannya haruslah senantiasa sadar bahwa kehadirannya dapat mempengaruhi orang-orang yang diamatinya. Orang yang menjadi sasaran penelitian juga akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh peneliti yang mengamati mereka bilaman mereka melihat peneliti ini”.

Dengan demikian, dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai alat pengumpul data dan menjadi segalanya dalam sebuah proses penelitian.

3.6. Tahap dan Proses Penelitian

1. Tahap Pra-lapangan

- Menyusun rancangan penelitian
- Memilih lapangan penelitian
- Mengurus surat ijin penelitian
- Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- Memiliki dan menetapkan narasumber/informan
- Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- Sebelum memasuki latar pekerjaan lapangan, peneliti terlebih dahulu berusaha memahami latar penelitian, melakukan penelitian dengan melakukan wawancara sambil mengumpulkan data. Tugas peneliti adalah mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin dari sudut pandang subjek (peneliti) tanpa mempengaruhi objek (informan). Sebelum itu peneliti melakukan pendekatan dengan maksud supaya dalam pencarian data dan informasi-informasi yang diperlukan tidak akan mengalami kesulitan. Pada tahap ini, peneliti berusaha memperhitungkan waktu, mengupayakan waktu dalam penelitian ini

menjadi seefisien mungkin dengan berpedoman pada jadwal penelitian.

- Peran Serta Sambil Mengumpulkan Data

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya maka peneliti tidak terpancing untuk mengikuti kegiatan masyarakat atau orang pada latar penelitian. Adapun data yang diperoleh dicatat berdasarkan hasil wawancara atau pengamatan.

3. Tahap Analisis Data

Analisa data dilakukan secara *ex post facto* yakni data dikumpulkan setelah semua kejadian berlansung dan dalam tahap ini peneliti memproses dan mengurutkan data-data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dengan menggunakan *interactive model analysis* dari Miles dan Huberman. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut:

- a) Pemrosesan satuan, data yang terkumpul dari lapangan yang berupa catatan lapangan diproses dengan merangkum dan menghaluskan catatan dilapangan
- b) Kategorisasi, mengelompokkan data atas dasar pikiran, institusi, pendapat atau dengan criteria tertentu
- c) Penafsiran data, dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan, data yang telah dikumpulkan dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah ditetapkan selanjutnya dapat ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan sebuah konsep atau teori yang ada.

4. Tahap Dalam Penulisan Laporan

Setelah selesai mengadakan penelitian, peneliti membuat laporan hasil penelitian. Menurut pendapat **Lexy J.Moleong (2000:216)** menjelaskan bahwa: “*penulisan laporan hasil penelitian itu berfungsi untuk memenuhi beberapa keperluan seperti keperluan studi akademis, perkembangan ilmu pengetahuan, keperluan lembaga dan keperluan publikasi ilmiah*”.

3.7. Logistik Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik sebagai salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi. Maka penelitian ini bersifat perorangan dengan biaya yang ditanggung oleh peneliti sendiri.

Adapun alat yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai kelengkapan logistik adalah berupa alat perekam, alat tulis, kamera, serta komputer untuk pengetikan dan pemrosesan data.

3.8. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisa bahan bacaan, dokumen, dan sumber literature yang ada hubungannya dengan materi yang diteliti, sehingga akan memperkuat materi pembahasan nantinya.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu usaha pengumpulan data dari informan yang diperlukan langsung dari lokasi penelitian dengan cara yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan narasumber atau informan terhadap objek yang diteliti. Hal ini dimaksud untuk merekam hasil ucapan-ucapan yang disampaikan secara langsung dari kata-kata dan tindakan-tindakan informan. Namun peneliti harus menyiapkan alat perekam dan alat tulis.

Penelitian ini diawali dengan menggali informasi tentang kandidat narasumber yakni dengan diskusi pendahuluan dengan pihak pengelola PPK di tingkat kecamatan yakni Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) selaku Penanggung Jawab Operational Kegiatan (PJOK) yang ditunjuk oleh pengelola PPK Pusat yakni Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD). Berdasarkan hasil diskusi peneliti menetapkan mereka yang akan menjadi narasumber atau informan kunci adalah sebagai berikut:

- 1 orang Kepala Camat Kecamatan Cibadak
- 3 orang Kepala Desa (Desa Karangtengah, Desa Pamuruyan, Desa Neglasari)
- 1 orang Lurah Kelurahan Cibadak
- 2 orang mantan Kepala Desa (Desa Karangtengah, Desa Neglasari)
- 4 orang mantan Fasilitator di 4 wilayah penelitian
- 3 orang perwakilan masyarakat di masing-masing wilayah penelitian
- 1 orang perwakilan kelompok perempuan di masing-masing wilayah penelitian

Sedangkan untuk verifikasi hasil wawancara dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan wawancara serta dilakukan proses triangulasi.

b) Dokumen

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu dari hasil penelitian dilapangan dengan jalan mencatat segala fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dan digunakan sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan. Data ini sering juga disebut sebagai data sekunder.

c) Audio Visual

Audio visual yaitu mengumpulkan atau penangkapan data / informasi yang dilakukan secara visual seperti , film dan lain-lain. Untuk penyediaan bagi informasi suatu kesempatan membagi secara langsung realita yang selanjutnya dilakukan visual image oleh peneliti.

d) Teknik Pencatatan Data

Data dan hasil wawancara tersebut dicatat pada kartu khusus yang telah disediakan. Pencatatan data didasari dengan ketepatan pada struktur

data. Ketepatan berarti kemampuan peneliti untuk menghasilkan data setepat mungkin, sedangkan struktur adalah pencatatan data yang pada mulanya bersifat umum dan akhirnya diarahkan kepada yang khusus.

3.9. Teknik Pengolahan Data

1. Pemrosesan Satuan

Pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari narasumber (wawancara dan juga pengamatan) maupun data sekunder (dokumen, laporan, dan sebagainya). Kemudian membuat abstraksi dengan rangkuman yang inti, dimana dalam proses dan pernyataannya perlu dijaga sehingga data dioleh secara halus dalam pencatatan data.

2. Kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori atas dasar pikiran, intuisi, pendapatan atau criteria tertentu terhadap data (informan) yang diperoleh.

3. Reduksi Data

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan tidak boleh dipengaruhi, biarkan saja berbicara apa yang diucapkannya. Selesai wawancara peneliti menyeleksi hasil wawancara, mengambil data yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan data yang tidak dibutuhkan direduksi yakni tidak dibuang namun disimpan untuk keperluan dimasa mendatang, jika diperlukan.

3.10. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data menurut **Moleong (2000:188)** adalah:

“Pengujian keabsahan data didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Dengan demikian data yang diperoleh harus dapat dipercaya, dapat diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama, konsep ditinjau dari berbagai segi dan kepastian dari segi objektivitas”.

Lebih lanjut dikatakan pengujian keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependentability*) dan kepastian (*confirmability*). Selanjutnya dalam pengujian data didukung dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu (trigulasi) yaitu check, recheck dan cross check (**Moleong, 1998:178**). Yang dimaksud dengan teknik triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

3.11. Teknik Penafsiran Data

Penafsiran data dapat dilakukan apabila seluruh data yang diperoleh telah terkumpul, setelah itu data dihubungkan dan diuji dengan kategori yang telah ditetapkan yakni siklus proses tahapan kegiatan PPK sebagaimana disampaikan pada Bab I halaman 11-14, kemudian ditafsirkan lalu dihubungkan dengan konsep atau teori yang ada.

3.12. Lokasi Penelitian

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini dibatasi pada empat wilayah yang berada pada wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Yakni Kelurahan Cibadak, Desa Pamuruyan, Desa Karangtengah dan Desa Neglasari. Pemilihan lokasi penelitian difokuskan di empat wilayah yang terbagi dalam dua jenis klasifikasi wilayah berdasarkan data Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2009, yakni yang mewakili klasifikasi perkotaan (Kelurahan Cibadak dan Desa Karangtengah) dan perdesaan (Desa Pamuruyan dan Desa Neglasari). Adapun penentuan klasifikasi tersebut yang ditetapkan oleh BPS adalah dilihat dari sisi kepadatan penduduk dan komposisi jenis pekerjaan, yakni dimana mayoritas adalah perdagangan dan jasa untuk klasifikasi perkotaan, dan pertanian dan jasa untuk klasifikasi perdesaan (Tabel 1.2.).

Pemilihan lokasi tersebut lebih dikarenakan peneliti beranggapan ke empat wilayah tersebut dapat menunjukkan karakteristik yang terdapat di Kecamatan

Cibadak. Sedang pemilihan kecamatan dikarenakan kecamatan ini telah menjadi penerima dana PPK yang memiliki jumlah keluarga pra-sejahtera terbanyak dengan jumlah 7,805 KK dari jumlah keseluruhan sebanyak 147,076 KK (Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2009). Lebih lanjut juga dikarenakan data statistik pada tahun 2009 menyatakan ada 8,124 Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 30,375 orang dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Cibadak, yakni sebanyak 103,032 orang. Ini artinya ada 30 persen penduduk di kecamatan ini yang masuk kategori sebagai penduduk miskin.



BAB 4
TEMUAN LAPANGAN:
KEGIATAN PPK DAN IMPLEMENTASINYA
DI KECAMATAN CIBADAK

4.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian di Lapangan

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi berada di wilayah di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh 96 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota Negara (Jakarta).

Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6°57' – 7° 25' Lintang Selatan dan 106°49' – 107°00' Bujur Timur dan mempunyai luas daerah 4.128 km² atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa, dengan batas-batas wilayahnya:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cianjur

Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (*enclave*) dikelilingi beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Kebon Pedes di sebelah Timur.

Tabel 4.1.
Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukabumi

Kecamatan	Utara	Selatan	Timur	Barat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01. Ciemas	Simpenan	Samudra Hindia	Ciracap	Samudra Hindia
02. Ciracap	Waluran	Samudra Hindia	Surade	Ciemas
03. Waluran	Lengkong	Jampangkulon	Jampangkulon	Ciemas
04. Surade	Jampangkulon	Samudra Hindia	Cibitung	Ciracap
05. Cibitung	Jampangkulon	Samudra Hindia	Kalibunder	Surade
06. Jampang Kulon	Waluran/Lengkong	Cibitung	Cimanggu/Kalibunder	Waluran/Surade
07. Cimanggu	Lengkong	Kalibunder	Kalibunder	Jampangkulon
08. Kalibunder	Lengkong	Tegalbuleud	Cidolog	Jampangkulon
09. Tegalbuleud	Cidolog	Samudra Hindia	Kabupaten Cianjur	Cibitung
10. Cidolog	Sagaranten	Tegalbuleud	Kabupaten Cianjur	Tegalbuleud
11. Sagaranten	Pabuaran	Cidolog	Curugkembar	Pabuaran
12. Cidadak	Curugkembar	Tegalbuleud	Kabupaten Cianjur	Sagaranten
13. Curug Kembar	Nyalindung / Purabaya	Cidadak	Kabupaten Cianjur	Sagaranten
14. Pabuaran	Purabaya	Kalibunder	Sagaranten	Lengkong
15. Lengkong	Jampangtengah	Jampangkulon	Pabuaran	Simpenan
16. Pelabuhanratu	Cikidang	Samudra Hindia	Bantargadung	Cikakak
17. Simpenan	Pelabuhanratu	Waluran	Lengkong	Samudra Hindia
18. Warungkiara	Cibadak	Jampangtengah	Cikembar	Bantargadung
19. Bantargadung	Cikidang	Simpenan	Warungkiara	Pelabuhanratu
20. Jampangtengah	Cikembar	Lengkong	Nyalindung	Cikembar / Simpenan
21. Purabaya	Nyalindung	Sagaranten	Curugkembar	Jampangtengah
22. Cikembar	Cibadak	Jampangtengah	Gunungguruh	Warungkiara
23. Nyalindung	Kota Sukabumi	Purabaya	Kabupaten Cianjur	Jampangtengah
24. Gegerbitung	Cireunghas	Nyalindung	Kabupaten Cianjur	Nyalindung
25. Sukaraja	Sukabumi	Kebonpedes	Sukalarang	Kota Sukabumi
26. Sukalarang	Sukaraja	Cireunghas	Kabupaten Cianjur	Sukaraja
27. Cireunghas	Sukalarang	Gegerbitung	Kabupaten Cianjur	Kebonpedes
28. Kebonpedes	Sukaraja	Nyalindung	Sukalarang	Kota Sukabumi
29. Sukabumi	Gunung Gede	Kota Sukabumi	Sukaraja	Cisaat
30. Kadudampit	Gunung Gede	Cisaat	Sukabumi	Caringin
31. Cisaat	Kadudampit	Gunungguruh	Kota Sukabumi	Cicantayan
32. Gunung Guruh	Cisaat	Cikembar	Kota Sukabumi	Cicantayan
33. Cibadak	Nagrak	Cikembar	Cicantayan	Parungkuda
34. Cicantayan	Caringin	Cikembar	Cisaat	Cibadak
35. Caringin	Nagrak	Cicantayan	Kadudampit	Cibadak
36. Nagrak	Ciambar / Kabupaten Bogor	Cibadak	Caringin	Ciambar / Parungkuda
37. Ciambar	Cicucug / Kabupaten Bogor	Nagrak	Nagrak	Cicurug / Parungkuda
38. Cicurug	Kabupaten Bogor	Parungkuda	Gununggede	Cidahu
39. Cidahu	Kabupaten Bogor	Bojonggenteng / Parungkuda	Cicurug	Parakansalak
40. Parakansalak	Kabupaten Bogor	Bojonggenteng	Cidahu	Kalapanunggal
41. Parungkuda	Cicurug / Cidahu	Cibadak	Nagrak	Bojonggenteng
42. Bojonggenteng	Cidahu	Cikidang	Parungkuda	Kalapanunggal
43. Kalapanunggal	Kabandungan	Cikidang	Parakansalak	Kabandungan
44. Cikidang	Kalapanunggal	Pelabuhanratu	Cibadak	Cisolok
45. Cisolok	Kabandungan	Samudra Hindia	Cikakak	Kabupaten Lebak
46. Cikakak	Kabandungan	Samudra Hindia	Pelabuhanratu	Cisolok
47. Kabandungan	Kabupaten Bogor	Cisolok / Parakansalak	Kalapanunggal	Kabupaten Lebak

(Data: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2006)

4.1.2. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Cibadak memiliki luas wilayah 6.343,54 hektar dan berbatasan dengan wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Nagrak
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cikembar
- Sebelah Timur : Kecamatan Cicantayan
- Sebelah Barat : Kecamatan Parung Kuda

Kecamatan Cibadak memiliki luas kota / kawasan perkotaan 6.289.29 hektar masuk dalam klasifikasi kota kecil dengan fungsi pendidikan, industri, jasa dan perdagangan, dan pertanian. Potensi andalan Kecamatan Cibadak adalah hasil pertanian berupa sayuran dan buah-buahan serta hasil sumber daya alam lokal seperti Batu Bata, Kaolin, Marmer, Batu Apung, Tras, Batu Hijau dan Batu Sirap. Luas Kecamatan Cibadak menurut kemampuan tanah (ketinggian) dibagi dalam dua kriteria ketinggian yaitu ketinggian 100-500 meter dibawah permukaan laut seluas 4.655.47 hektar, ketinggian 500-1000 meter dibawah permukaan laut seluas 11.633,82 hektar. Rata-rata penggunaannya untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan industri. Jarak dari Kecamatan Cibadak menuju Ibu Kota Kabupaten Sukabumi adalah 58 kilometer, yang dapat ditempuh dengan waktu perjalanan selama 2 jam.

Berdasarkan data statistik tahun 2006, bahwa rumah tangga miskin (RTM) yang ada di Kecamatan Cibadak pada tahun 2006 adalah sebanyak 8,124 RTM dengan jumlah penduduk miskin 30.375 orang dari jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Cibadak sebanyak 103.032 orang, berarti 29,48% penduduk Kecamatan Cibadak masuk dalam kategori penduduk miskin.

Secara administrasi Kecamatan Cibadak terbagi menjadi 9 desa, 1 kelurahan, 135 RW dan 481 RT, dengan jumlah penduduk dan dusun sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2. Penduduk Kecamatan Cibadak pada tahun 2006 tercatat 103.032 jiwa. Dari 10 Desa / Kelurahan yang ada, Kelurahan Cibadak memiliki kepadatan penduduk tertinggi (28.097 orang), sedangkan Desa Neglasari memiliki kepadatan penduduk terendah (5.634 orang). Jumlah desa / kelurahan menurut klasifikasi perkotaan tahun 2006 di Kecamatan Cibadak adalah

6 wilayah termasuk dalam kategori perdesaan dan 4 wilayah termasuk kedalam wilayah klasifikasi perkotaan.

Jumlah penduduk awal tahun di Kecamatan Cibadak berjumlah 96.647 orang dengan komposisi laki-laki 49.049 orang dan perempuan 47.598 orang. Sedangkan jumlah penduduk akhir tahun sebanyak 103.032 orang dengan komposisi laki-laki sejumlah 56.909 orang dan perempuan sejumlah 46.123 orang. Ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang datang dan menetap di Kecamatan Cibadak menjelang akhir tahun.

Tabel 4.2.

Jumlah Penduduk di Kecamatan Cibadak Menurut Desa Tahun 2006

No.	Desa / Kelurahan	Jumlah Dusun	Jumlah (Jiwa)
1	Kelurahan Cibadak (Perkotaan)	4	28.097
2	Desa Pamuruyan (Perdesaan)	3	7.351
3	Desa Sekarwangi (Perkotaan)	3	10.664
4	Desa Karangtengah (Perkotaan)	5	13.252
5	Desa Ciheulang (Perdesaan)	4	9.680
6	Desa Sukasirna (Perdesaan)	3	9.536
7	Desa Neglasari (Perdesaan)	2	5.634
8	Desa Batununggal (Perkotaan)	3	7.212
9	Desa Warnajati (Perdesaan)	2	5.916
10	Desa Tenjojaya (Perdesaan)	3	5.690

(Sumber: Data Laporan PPK 2006, Sekretariat PPK Kec. Cibadak)

Adapun yang menjadi lokasi penelitian di kecamatan ini adalah di empat wilayah yang menggambarkan kategori perdesaan yakni Desa Pamuruyan dan Desa Neglasari, dan menggambarkan kategori perkotaan yakni Kelurahan Cibadak dan Desa Karang Tengah. Secara umum keseluruhan wilayah penelitian tersebut berada di daerah dataran di luar kawasan hutan. Mayoritas sumber penghasilan utama untuk daerah yang menggambarkan klasifikasi perkotaan adalah dari sektor pertanian, jasa dan perdagangan, dan untuk daerah yang menggambarkan klasifikasi perdesaan adalah dari sektor pertanian dan jasa.

Jumlah keluarga miskin di Kelurahan Cibadak adalah sejumlah 2,570 dari total 7,059 keluarga, sedangkan di Desa Karang Tengah adalah sejumlah 1,007 dari total 3,110 keluarga, Desa Pamuruyan dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 783 dari total 2,004 keluarga dan Desa Neglasari dengan jumlah keluarga miskin sebanyak 791 dari total 1,569 keluarga.

4.1.3. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peranan penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Cibadak. Pembangunan di bidang pendidikan akan menjadi motor penggerak pembangunan di bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berupaya untuk memenuhi segala fasilitas / sarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di seluruh kecamatan. Sarana pendidikan di Kecamatan Cibadak dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.

Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Cibadak

No.	Desa / Kelurahan	SD	SLTP	SLTA
1	Kelurahan Cibadak	16	7	3
2	Desa Pamuruyan	4	1	1
3	Desa Sekarwangi	6	2	3
4	Desa Karangtengah	7	3	3
5	Desa Ciheulang Tonggoh	4	1	1
6	Desa Sukasirna	5	1	-
7	Desa Neglasari	3	-	-
8	Desa Batununggal	2	2	1
9	Desa Warnajati	4	1	-
10	Desa Tenjojaya	3	1	1

(Sumber: Data Dasar Perencanaan Pembangunan Tahun 2006)

Untuk tenaga guru yang tersedia pada tahun 2006 secara umum meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2006 adalah untuk SD sebanyak 538 orang, SMP/ sederajat 386 orang, SMA/ sederajat 399 orang.

Jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Cibadak tahun 2006 adalah sebanyak 16.88 persen tidak tamat sekolah dasar, 55.91 persen tamat SD-SMP, dan sisanya tamat SLTA keatas. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel data berikut ini.

Tabel 4.4.
Jumlah Kepala Keluarga menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Cibadak tahun 2006

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	4.277	16.88
2	Tamat SD – SMP	14.168	55.91
3	Tamat SLTA ke atas	6.894	27.21
J U M L A H		25.339	100.00

(Sumber: Data Dasar Perencanaan Pembangunan Tahun 2006)

Kesehatan adalah aspek utama selain pendidikan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan cara pandang dari paradigma sakit ke paradigma sehat, sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi Sehat 2010. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, berbagai fasilitas kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dua unit puskesmas, pelayanan kesehatan melalui posyandu berjumlah 135 buah, dan bidan desa sebanyak 9 orang.

4.2. Kegiatan PPK dan Pelaksanaannya di Kecamatan Cibadak

Pelaksanaan kegiatan PPK di wilayah ini berjalan selama tahun anggaran ketiga dari Program Pengembangan Kecamatan untuk Kabupaten Sukabumi,

yakni pada tahun 2005-2008. Sembilan desa dan satu kelurahan sebagaimana terlihat dalam tabel 4.2. tercatat sebagai daerah penerima dana bantuan PPK. Sebagaimana daerah penerima lainnya setiap kecamatan menerima dana bantuan PPK sebesar Rp. 1 hingga Rp. 1,5 milyar, setelah mengusulkan kegiatannya yakni untuk kegiatan prasarana dan sarana, serta kegiatan usaha ekonomi produktif. Berdasarkan data Kantor Kecamatan Cibadak tahun 2009, kegiatan prasarana dan sarana di wilayah ini tercatat telah menelan biaya sebesar Rp. 3,240 milyar atau sekitar 72% dari total jumlah kegiatan PPK untuk tahun anggaran tersebut diatas yakni sejumlah Rp. 4,5 milyar. Adapun dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan jembatan gantung, pembangunan jembatan penghubung antar desa, perbaikan jalan, pengaspalan jalan, perbaikan saluran air, pembangunan air serapan dan pengairan, pembangunan tanki air, dan perbaikan posyandu. Sedangkan sisanya yakni sebesar Rp. 1,260 milyar (28%) telah dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan usaha ekonomi produktif atau simpan pinjam. Menurut data dari kantor PMD Kabupaten Sukabumi tahun 2009 di Kecamatan Cibadak tercatat kegiatan PPK telah menyerap sekitar 4,930 orang pekerja (4.78% dari total penduduk sebesar 103.032 orang) yang terlibat dalam pelaksanaan PPK, yang pada umumnya berasal dari masyarakat lokal.

Berdasarkan temuan lapangan, partisipasi masyarakat di empat wilayah penelitian di Kecamatan Cibadak masih termasuk lemah, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pada proses kegiatan PPK. Mayoritas narasumber dari ke empat wilayah penelitian ini banyak mengeluh kurang menerima informasi, serta tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan seperti dalam forum musyawarah oleh aparat pemerintah desa (kepala desa) dan unsur lembaga masyarakat (LKMD). Perencanaan pembangunan belum secara optimal memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Demikian juga dalam hal pengambilan keputusan seperti penetapan prioritas kegiatan yang akan diajukan, ternyata lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa serta aparat dan LKMD tanpa melibatkan masyarakat. Selain karena mayoritas masyarakat juga masih bersikap pasif yang lebih disebabkan oleh lemahnya kesadaran untuk berpartisipasi dan juga rendahnya tingkat pendidikan, mereka juga tidak memiliki patron yang kuat, seorang kepala desa

berintegritas yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam memimpin desa. Sering kali masyarakat bersikap tidak peduli dan lebih bersikap menyerahkan segala sesuatunya terkait pembangunan didaerahnya kepada aparat desa. Kendala semacam ini pada akhirnya memberikan kesempatan bagi aparat desa, yakni kepala desa dan pengurus LKMD, untuk melakukan tindak korupsi dan sejumlah penyelewengan lainnya. Sebagai contoh berdasarkan wawancara dengan sejumlah narasumber yang berasal dari dua desa focus penelitian yakni Desa Pamaruyan dan Desa Neglasari, ada sejumlah pengaduan terkait penambahan harga secara signifikan dalam usulan desa dan bahan- bahan untuk proyek-proyek prasarana, yakni jembatan, jalan, dan penyediaan air bersih. Bahan-bahan ternyata tidak di beli, tetapi diambil dari lingkungan sekitar. Juga ada adanya informasi dari narasumber dari Kelurahan Cibadak dimana terkait dana simpan pinjam yang ternyata lebih dimonopoli oleh elit desa yang relatif sudah lebih mampu, serta adanya kasus dimana tanki penyaluran air yang dibangun didepan rumah Kepala Desa setempat. Fakta juga menunjukkan bahwa di tiga wilayah penelitian tersebut telah terjadi pengambil-alihan tugas dan fungsi Tim Pelaksana kegiatan Desa (TPKD), sedangkan Kepala Desa di wilayah tersebut hanya sebagai Pembina kegiatan PPK, bukan sebagai pelaksana.

Lebih lanjut berdasarkan temuan di lapangan, berikut adalah gambaran pelaksanaan kegiatan PPK di lokasi penelitian yang dideskripsikan berdasarkan siklus kegiatan PPK:

❖ **Diseminasi Informasi Kegiatan PPK di Kecamatan Cibadak**

Diseminasi informasi untuk mensosialisasikan dan mempopulerkan kegiatan PPK bagi warga Kecamatan Cibadak dilakukan di tingkat desa melalui Forum Musbangdes dan ditingkat dusun melalui Forum Musbangdus menjelang akhir tahun 2004. Pada pertemuan di tahap ini selain pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat dan perempuan juga turut diundang untuk menghadiri pertemuan ini.

Namun demikian berdasarkan temuan dilapangan berdasarkan wawancara dengan sejumlah narasumber dari empat wilayah penelitian sepakat

mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengetahui diadakannya suatu pertemuan pendahuluan guna penyebaran informasi sebelum dimulainya perencanaan kegiatan PPK. Seorang narasumber dari Kelurahan Cibadak mengatakan bahwa saat pertama kali ia diundang dalam suatu pertemuan adalah pertemuan yang membahas perencanaan usulan kegiatan yang akan didanai oleh PPK dan bukan merupakan pertemuan terkait diseminasi informasi. Lebih lanjut seorang tokoh masyarakat dari Desa Karangtengah mengatakan bahwa tidak semua perwakilan tokoh masyarakat dari desanya diundang saat pertemuan sosialisasi PPK. Mereka yang diundang lebih merupakan orang-orang pilihan elit desa setempat. Seorang narasumber perempuan dari Desa Pamaruyan mengatakan demikian: *“Saya ingat ada pertemuan tentang PPK di akhir tahun 2004. Tetapi seingat saya pertemuannya dilakukan di malam hari. Saya dan ibu-ibu lain tidak bisa hadir. Kami cuma dengar dari Pak Kades akan ada pembangunan jalan yang didanai dari orang Jakarta”*.

Namun demikian mayoritas narasumber dari keseluruhan wilayah penelitian mengatakan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan dengan dana bantuan PPK dilakukan, mereka telah terlebih dahulu mengetahui akan adanya suatu proyek pembangunan, meski saat itu belum mengetahui persis tentang apa itu PPK, yakni melalui tulisan di papan informasi yang terletak di kantor kepala desa setempat, dan adanya informasi dari mulut ke mulut tentang dibukanya lowongan kesempatan bekerja untuk proyek pembangunan jembatan dan perbaikan jalan di daerah mereka.

❖ **Perencanaan Kegiatan PPK**

Sebelum pelaksanaan kegiatan PPK dimulai, perencanaan dilakukan di tingkat kecamatan melalui suatu pertemuan Musbangdes, Musbangdus, dan pertemuan kelompok lainnya. Perencanaan dilakukan untuk memilih dan menetapkan desa yang akan berpartisipasi untuk kemudian dibahas dalam Forum Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) I. Dalam forum ini, Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab) mendata calon anggota Tim

Teknis Desa (TTD) dan melakukan pembentukan tim verifikasi. Calon TTD kemudian diserahkan kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di setiap desa, yakni dalam Forum Musbangdes II untuk memilih dan menetapkan anggota TTD, menentukan usulan desa dan wakil desa. Diharapkan mereka yang terpilih adalah orang-orang yang dianggap memiliki wawasan serta mampu melaksanakan tugas dari awal hingga akhir kegiatan.

Perencanaan di desa dalam Forum Musbangdes I memilih Fasilitator Desa (FD), yang difasilitasi oleh Fasilitator Kabupaten (FK) dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) serta dihadiri oleh wakil-wakil dari dusun/kelompok perempuan dan laki-laki, organisasi lokal setempat, kepala desa, pengurus LKMD serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sebelum FD menjalankan tugasnya, FK dan PJOK memberikan pelatihan yang berhubungan dengan tugas-tugas FD, yakni menggali gagasan kegiatan yang nantinya dapat diusulkan oleh masyarakat. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TKPD) adalah orang-orang yang dipilih yang dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian, yakni khususnya dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang tinggi, sehingga nantinya diharapkan mereka mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan penelitian di lapangan di 3 desa yakni Desa Karang Tengah, Desa Pamaruyan dan Desa Neglasari, TKPD yang telah terbentuk berdasarkan hasil Musbangdes II adalah warga desa yang berpendidikan tamatan SD hingga SMP, yang ternyata terbukti kurang memiliki kemampuan SDM untuk dapat menggali gagasan usulan kegiatan masyarakat. Sedangkan untuk Kelurahan Cibadak ada anggota TKPD yang berlatar-belakang pendidikan tamatan SMA. Namun demikian keseluruhan narasumber berpendapat bahwa mereka yang terpilih sebagai anggota TKPD dianggap kurang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga cukup mendapat kesulitan pada saat mereka harus berhadapan dengan masyarakat. Selain itu narasumber juga mengeluhkan pola fasilitasi yang diberikan yang dianggap terlalu kaku, formal dan cenderung satu arah. Hal ini ternyata berdampak terhadap partisipasi masyarakat desa

setempat untuk turut terlibat dalam kegiatan perencanaan PPK, yaitu dapat bersama-sama memahami kebutuhan bersama dan mengusulkan kegiatan yang menjadi keinginan utama masyarakat. TKPD di keseluruhan desa tersebut juga dianggap kurang mampu memfasilitasi dan mengkoordinir usulan-usulan masyarakat yang saling berbeda. Seorang narasumber dari Kelurahan Cibadak mengakui bahwa dikarenakan adanya usulan yang berbeda dan tidak berhasilnya dicapai kesepakatan antar warga untuk memilih prioritas kegiatan yang akan diusulkan, maka pada akhirnya aparat desa melakukan intervensi dan memutuskan kegiatan yang akan didanai. Hal serupa juga diakui terjadi di dua desa lain yakni Desa Neglasari dan Desa Pamuruyan sebagaimana diungkapkan oleh narasumber dari wilayah tersebut. Dengan demikian sejumlah kegiatan yang didanai PPK bukan lagi merupakan keputusan bersama masyarakat, melainkan lebih didominasi oleh aparat desa.

Dalam fase perencanaan ini sejumlah narasumber dari ke empat wilayah fokus penelitian sepakat mengakui bahwa campur tangan aparat desa dalam hal penentuan usulan kegiatan dan pengambilan keputusan masih sangat dominan. Sebagai contoh sebagaimana diungkapkan oleh narasumber perempuan dari Desa Karangtengah yang menyatakan bahwa mayoritas warga desanya menginginkan agar kegiatan simpan pinjam lebih diutamakan, namun aparat desa setempat pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan mayoritas dana PPK pada pembangunan prasarana dan sarana. Beberapa narasumber dari Desa Pamuruyan dan Desa Neglasari menyampaikan bahwa lemahnya kemampuan TKPD lebih disebabkan oleh adanya dominasi aparat, sehingga mempengaruhi kinerja TKPD untuk menggali usulan warga dan memfasilitasi usulan warga yang saling berbeda. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh narasumber dari Kelurahan Cibadak dan Desa Karangtengah yang juga menambahkan bahwa dominasi aparat di wilayah mereka juga terjadi dikarenakan sulitnya mempertemukan warga yang mayoritas lebih mengutamakan pekerjaan sehari-harinya daripada hadir dalam suatu forum musyawarah untuk menggali usulan kegiatan. Sehingga untuk mempersingkat waktu perencanaan kegiatan usulan PPK, pada akhirnya aparat

desa mengambil peran sebagai penentu dan pengambil keputusan. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip PPK dimana partisipasi masyarakat, khususnya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan, bahwa setiap perencanaan dan keputusan diambil atas kesepakatan seluruh warga dan bukan hanya milik atau dilakukan oleh kalangan elit desa. Seorang narasumber yang adalah mantan kepala desa di Kelurahan Cibadak pada masa berlangsungnya kegiatan PPK mengakui bahwa seringkali ia harus memutuskan segala sesuatunya karena ia merasa masyarakat kurang paham, lamban, dan karena tuntutan keterbatasan waktu untuk dapat segera merealisasikan pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut narasumber terkait mengatakan bahwa jika harus menunggu kesepakatan masyarakat maka akan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi semakin tertunda lama. Sementara seorang narasumber lain dari Desa Pamuruyan yang adalah mantan FD dan mengatakan bahwa penunjukannya sebagai FD lebih karena permintaan dari Kepala Desa. Narasumber ini mengakui ia telah mendapat pelatihan selama seminggu dari penyelenggara PPK di tingkat kabupaten sebelum masa tugasnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sulit mendapatkan orang yang mau menjadi FD dari lingkungan sekitar. Namun demikian seorang narasumber lain yang adalah warga desa tersebut mengatakan kelompoknya tidak pernah merasa tahu bahwa pernah ada pembukaan lowongan untuk menjadi FD.

Lebih lanjut terkait perencanaan, seorang narasumber perempuan dari Desa Karangtengah mengatakan bahwa banyak usulan dari kaum perempuan yang pada akhirnya tidak pernah diterima dalam Forum UDKP. Lebih lanjut narasumber ini mengatakan demikian:

“Kami dari kaum perempuan mengusulkan untuk dana PPK Tahun Anggaran 2005-2006 supaya di usaha ekonomi produktif/simpan pinjam lebih diutamakan, karena kami dari pedagang kecil ingin dapat mengembangkan dan ingin menambah modal usaha dari yang ada. Namun Pak Kades lebih mengutamakan untuk program pembangunan jalan, jembatan dan semacamnya”.

Seorang pejabat dari Kantor PMD Kecamatan Cibadak mengatakan bahwa:

“Apabila simpan pinjam diadakan nyatanya akan mempersulit petugas untuk menagih angsuran perbulannya, karena sering kali setiap kali ditagih warga suka mengulur-ulur waktu, padahal target simpan pinjam harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”.

Lebih lanjut terkait partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan guna menggali gagasan atau sumbangan pemikiran untuk kegiatan PPK, peneliti juga menemukan bahwa selama ini masyarakat lebih banyak diam dan berperan sebagai pendengar dan selalu menerima apa yang dikatakan oleh aparat atau elit desa, termasuk dalam forum-forum musyawarah. Seorang narasumber dari Desa Neglasari mengeluhkan sikap pimpinan aparat desa yang cenderung dominan, kurang peka terhadap keinginan dan kebutuhan warganya, serta kurang menunjukkan keinginan untuk melibatkan masyarakat. Lebih lanjut narasumber tersebut mengatakan demikian:

“Pada umumnya sumbangan pikiran dan gagasan yang disampaikan masyarakat dalam forum sulit untuk diterima oleh aparat desa. Masyarakat jadi malas datang dan terlibat. Padahal gagasan yang mereka sampaikan untuk perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang memang dibutuhkan dalam perekonomian mereka”.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam perencanaan kegiatan PPK di keseluruhan lokasi penelitian di Kecamatan Cibadak ternyata mayoritas peranan partisipasi masyarakat dalam bersuara dan dalam menyumbangkan gagasan atau pikiran secara bersama-sama masih belum berjalan seperti yang diharapkan dalam desain kegiatan PPK sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah. Dalam kenyataannya masih banyak hambatan dan kesulitan untuk mempertemukan warga, mengkoordinir warga, mengaktifkan warga untuk dapat bersuara dan berani mengambil kesepakatan bersama berdasarkan prioritas kegiatan yang paling dirasakan manfaat dan keberlangsungannya bagi masyarakat.

Sejumlah narasumber dari ke empat lokasi penelitian mengeluhkan bahwa banyak warga desanya yang merasa tidak dilibatkan dalam pertemuan perencanaan guna membicarakan prioritas pembangunan yang seharusnya didasarkan kebutuhan utama masyarakat. Kebanyakan warga yang hadir bukan berdasarkan kerelaan untuk datang, tetapi berdasarkan undangan yang dikirimkan oleh aparat desa. Beberapa narasumber dari Desa Pamuruyan, Desa Neglasari dan Desa Karangtengah mengatakan bahwa ada banyak warga yang tidak pernah diundang dalam forum pertemuan perencanaan, tidak pernah mendapat informasi, dan juga sebagian yang hadir mengatakan bahwa usulan yang mereka usulkan sebelumnya ternyata tidak ditindaklanjuti tanpa mereka diberitahukan alasannya. Mereka kemudian mengakui bahwa ternyata hal ini membuat mereka menjadi malas dan segan untuk kembali hadir dalam pertemuan selanjutnya.

Aparat dan elit desa juga masih terlihat dominan dalam campur tangan perencanaan kegiatan PPK di keseluruhan lokasi penelitian. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi semakin pasif dan cenderung bersikap sebagai pendengar dan penerima. Dari beberapa kesaksian narasumber, dikatakan bahwa seringkali aparat desa berbicara dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat, namun apa yang diputuskan ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Sebagai contoh, sejumlah narasumber mengatakan bahwa kebanyakan warga menginginkan dana PPK lebih difokuskan untuk mendanai usaha ekonomi produktif untuk menambah modal usaha warga, hal inipun telah diusulkan oleh mayoritas warga dalam beberapa kesempatan pertemuan warga, namun demikian ternyata keputusan yang diambil adalah lebih mengutamakan pembangunan prasarana dan sarana.

❖ **Penyiapan Usulan dan Verifikasi**

Dalam hal penyiapan usulan, masing-masing LKMD di setiap desa dapat mengajukan maksimum dua proposal ke dalam Forum UDKP II, yang merupakan rapat tingkat kecamatan untuk menentukan proposal desa yang

diterima dan memilih anggota Unit Pengelola Keuangan (UPK). Jika ada dua usulan, maka usulan kedua haruslah berasal dari kelompok perempuan.

Berdasarkan temuan lapangan, kelompok perempuan dari Desa Karangtengah mengatakan bahwa mereka merasa dianak-tirikan. Usulan yang mereka sampaikan dalam forum, kebanyakan tidak dibahas lebih lanjut, dan diputuskan oleh mayoritas kelompok lelaki dan elit desa untuk mengutamakan dana PPK guna pembangunan prasarana dan sarana. Lebih lanjut narasumber perempuan dari Desa Karangtengah ini menyampaikan bahwa pada akhirnya kelompok peminjam yang banyak menerima dana PPK adalah mayoritas lelaki dan mereka yang sudah tergolong pengusaha kecil yang dianggap mampu menjalankan usahanya, sudah memiliki kios bahkan toko di pasar. Seorang narasumber dari Kelurahan Cibadak mengatakan ada kecurigaan warga setempat bahwa diawal pemberian dana pinjaman, kelompok penerima lebih dipilih karena mereka dikenal dekat dengan lingkaran elit desa. Terkait hal ini, seorang Kasi PMD Kecamatan Cibadak mengatakan bahwa sasaran pinjaman memang diberikan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, namun juga diutamakan bagi mereka yang dianggap sudah memiliki usaha yang relatif stabil. Demikian diungkapkan oleh narasumber yang bersangkutan:

“Khusus di kecamatan kami, simpan pinjam yang dilakukan kelompok masyarakat untuk tahun anggaran 2005-2006 adalah sebesar Rp. 12,300,000,- dari jumlah dana yang diberikan oleh PPK, besar dana tersebut hanya untuk beberapa kelompok saja. Kegiatan UEP/simpan pinjam masih sangat kecil mungkin jika dibandingkan dengan yang lain, dan juga kelompok yang pinjam tersebut adalah kelompok yang benar-benar mempunyai usaha, seperti pedagang pasar, pedagang toko sehingga untuk membayar angsuran pihak UPK tidak ada kesulitan, jadi tempo waktu pembayaran tepat pada waktunya”. (Bapak X, Kasi PMD Kec. Cibadak)

Dalam hal usulan kegiatan prasarana dan sarana, mayoritas narasumber mengatakan meski pada awalnya mereka cenderung menginginkan dana PPK diutamakan untuk kegiatan usaha produktif, namun mereka menyadari bahwa pembangunan prasarana dan sarana dibutuhkan bagi banyak warga guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Keterlibatan partisipasi

masyarakat dalam kegiatan ini terlihat pada partisipasi warga lokal untuk turut berswadaya membantu menyumbangkan sejumlah dana bagi keberlangsungan kegiatan PPK. Menurut informasi dari Kepala Camat setempat tercatat 10% yakni sejumlah Rp. 450 juta dari keseluruhan dana PPK adalah berasal dari dana masyarakat. Selain dari itu masyarakat juga terlihat membantu dalam penyediaan beberapa kebutuhan material pembangunan jalan dan jembatan seperti batu, semen dan pasir. Demikian juga dalam hal pembangunan posyandu khususnya di Desa Neglasari dan Desa Pamuruyan, sejumlah sarana pendukung yang tersedia adalah berkat bantuan warga setempat. Adapun bentuk partisipasi lain dinyatakan dalam penyediaan tenaga kerja guna kegiatan sejumlah proyek pembangunan. Tercatat ada sekitar 4,930 warga lokal dari Kecamatan Cibadak, dengan 890 diantaranya adalah perempuan, yang berpartisipasi sebagai tenaga kerja dalam kegiatan PPK. Meski masih belum mampu dilakukan secara continue dan masih relative kecil dalam penyerapan tenaga kerja, yakni hanya sekitar 4,78% dari total populasi di kecamatan ini, namun demikian telah menunjukkan bahwa kegiatan PPK di kecamatan ini cukup mendukung penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

Dalam hal verifikasi, peneliti mendapati temuan bahwa ternyata tim verifikasi kecamatan yang seharusnya terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat selaku mayoritas, kemudian fasilitator kecamatan dan tenaga teknis yang direkomendasikan oleh KM Kab, ternyata di wilayah penelitian, keterwakilan tokoh masyarakat masih relatif terbatas. Secara bersamaan sejumlah narasumber dari ke empat lokasi penelitian mengakui bahwa tokoh masyarakat yang telah terpilih dianggap bukan merupakan tokoh masyarakat yang sesungguhnya, yang seharusnya menjadi panutan warga, dipercaya dan dianggap dapat mewakili kepentingan warga. Beberapa narasumber dari Desa Neglasari dan Desa Pamuruyan mengatakan bahwa tokoh masyarakat yang terpilih dari desa mereka dianggap kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai yang lebih dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang relatif rendah. Mayoritas narasumber dari ke empat desa mengakui bahwa pada

akhirnya warga desa mereka lebih banyak mengikuti saran dan kemauan fasilitator kecamatan dan tenaga teknis.

Peneliti juga mendapati informasi berdasarkan temuan lapangan khususnya di Kelurahan Cibadak, Desa Karantengah dan Desa Pamuruyan bahwa proses verifikasi yang seharusnya melakukan peninjauan kelayakan usulan secara menyeluruh yakni antara lain meliputi kelayakan secara teknis dan ekonomis, kebermanfaatan bagi orang banyak khususnya masyarakat miskin, memperhatikan aspek rencana pemeliharaan hasil pembangunan dan rencana pengembalian bagi kegiatan ekonomi produktif simpan pinjam, serta memastikan peran partisipasi masyarakat dalam merumuskan gagasan usulan, ternyata masih banyak ditemui kelemahan kinerja tim yang lebih mengutamakan untuk melakukan tugasnya tepat waktu daripada memperhatikan aspek tersebut diatas. Sejumlah narasumber dari daerah ini mengeluhkan usulan kegiatan pembangunan seperti pembangunan tanki air dan penyediaan air bersih bukan dibangun didaerah padat penduduk miskin yang membutuhkan, tetapi lebih dipusatkan di daerah dimana banyak terdapat elit desa tinggal, sehingga kebermanfaatan hasil pembangunan kurang dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Demikian juga pada kelompok sasaran peminjam dari dana kegiatan ekonomi produktif yang lebih diutamakan bagi kelompok pedagang atau pengusaha kecil yang sudah relatif mapan dan stabil dalam usaha mereka, ketimbang mereka yang sungguh-sungguh memerlukannya untuk modal usaha dan sebagai upaya meningkatkan taraf ekonomi warga miskin.

❖ **Pemilihan Proyek**

Dalam tahap ini usulan desa yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi dibahas lebih lanjut terkait manfaat dan anggarannya dalam Forum UDKP II di tingkat Kecamatan. Dalam tahapan ini peneliti mendapatkan informasi berdasarkan temuan lapangan di ke empat lokasi penelitian bahwa sebagaimana dalam pertemuan UDKP I, yakni dimana perwakilan desa dan pejabat inti daerah dalam membahas PPK masih kurang menggali partisipasi

masyarakat (Desa Karangtengah, Desa Pamuruyan, dan Desa Neglasari) dan adanya kehadiran masyarakat yang masih rendah (Kelurahan Cibadak, Desa Neglasari), demikian pula dalam tahapan ini. Narasumber dari Desa Neglasari dan Kelurahan Cibadak mengatakan banyak warga desanya yang tidak mengetahui adanya pertemuan ini, tidak dapat menghadirinya dikarenakan pemberitahuan yang mendadak, ataupun tidak diundang dan dilibatkan. Selain itu narasumber dari Desa Karangtengah juga menyampaikan adanya keengganan masyarakat untuk hadir kembali dikarenakan dalam pertemuan sebelumnya merasa suara mereka tidak didengar, usulan mereka tidak ditindaklanjuti tanpa ada penyampaian alasan yang jelas dan transparan.

Namun demikian dalam hal penyebaran informasi dari keputusan akhir yang dihasilkan dalam phase ini, mayoritas narasumber dari ke empat lokasi penelitian menyatakan dapat melihat hasilnya pada papan informasi PPK yang terdapat di setiap desa dan kantor kecamatan. Juga dalam beberapa forum pertemuan dusun dan tingkat desa yang terjadi di 3 lokasi penelitian yakni Kelurahan Cibadak, Desa Karangtengah dan Desa Pamuruyan, hasil keputusan pemilihan proyek disampaikan secara khusus oleh Kepala Desa dan juga perwakilan aparat kecamatan.

❖ **Pelaksanaan dan Pengawasan Proyek**

Setelah diputuskan kegiatan mana yang layak didanai oleh PPK, maka tim teknis desa dibentuk dan dikontrak, yang kemudian ditandatangani oleh LKMD dan diketahui oleh Konsultan Kabupaten. Selanjutnya dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari lima orang yang diambil dari perwakilan dari setiap desa yang dipilih dalam Musbangdes III untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pelaksanaan kerja dari Tim Pelaksana ini, masyarakat juga pejabat pemerintah setempat dan konsultan PPK turut mengawasi pelaksanaan kegiatan, dan setiap status pelaksanaan akan dilaporkan dalam pertemuan desa dan kecamatan.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan semacam PPK sesungguhnya menjadi sangat menentukan dalam upaya meningkatkan efektivitas keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai, khususnya guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan PPK di Kecamatan Cibadak masih relatif lemah. Mayoritas narasumber dari ke empat lokasi penelitian mengatakan bahwa dikarenakan banyak masyarakat merasa tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam tahapan terdahulu, maka pada akhirnya berdampak terhadap kurang aktifnya mereka untuk terlibat dalam tahap pelaksanaannya. Seorang narasumber dari Desa Neglasari mengatakan karena ia tidak merasa dilibatkan mengakibatkan ia tidak merasa harus terlibat dan peduli dalam pelaksanaan kegiatan PPK. Seorang narasumber lain dari Kelurahan Cibadak juga mengatakan sepanjang yang ia ketahui, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan PPK adalah mayoritas kelompok yang paling dekat dengan lingkaran elit dan aparat desa.

Penelitian ini juga mencatat keluhan dari narasumber yang berasal dari Desa Neglasari dan Desa Karangtengah yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana seringkali terjadi ketidakcocokan antara rencana awal dengan pelaksanaannya. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya intervensi dari pihak aparat desa yang sering melakukan perubahan pada saat pelaksanaan dan berperan menentukan banyaknya perubahan. Sebagai contoh adalah perubahan prioritas pembangunan yang terjadi di Desa Neglasari. Sebagaimana telah disepakati bahwa akan dilakukan pembangunan jalan desa, namun dalam perjalanannya saat pelaksanaan, Kepala Desa memutuskan untuk memperbaiki jalan lama dengan pengaspalan dan bukan membuka suatu jalan baru didesa tersebut. Contoh lain sebagaimana terjadi di Desa Karangtengah yakni adanya perubahan pembelian bahan baku, penentuan upah tukang, dan penetapan tenaga teknis yang dipakai.

Terkait lemahnya peran serta masyarakat, seorang narasumber yang adalah Kasi PMD Kecamatan Cibadak mengatakan bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah adalah sebagai akibat latar belakang pendidikan yang juga rendah, serta faktor sosial ekonomi, budaya serta keterbatasan akses terhadap informasi. Lebih lanjut narasumber tersebut mengatakan demikian:

“Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan PPK disebabkan campurtangan aparat pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, juga karena kurangnya informasi, mereka jadi terisolasi dari informasi dan tidak memiliki partner untuk mengetahui progress kegiatan. Juga ada faktor lain seperti lemahnya pendidikan dan pengetahuan mereka, serta kesibukan mereka dalam hal usaha perekonomian mereka”.

❖ **Pemeliharaan**

Berdasarkan rancangan siklus kegiatan PPK yang telah ditetapkan di tingkat pusat, pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan masyarakat desa diharapkan dapat membentuk Panitia Pelaksana dan Pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemeliharaan fasilitas dan pengelolaan iuran pemeliharaan. Sedangkan untuk bantuan ekonomi, pengembalian pinjaman dikumpulkan oleh Penanggung Jawab Keuangan (UPK) untuk jangka waktu maksimal 18 bulan.

Berdasarkan temuan di lapangan ternyata Panitia Pemeliharaan di keseluruhan desa penelitian belum bekerja secara maksimal. Pembentukan tim ini masih sebatas formalitas, sedangkan peran sertanya secara aktif masih belum dapat dirasakan. Juga didapati informasi bahwa anggota tim yang terpilih, khususnya di Kelurahan Cibadak dan Desa Karangtengah juga sebelumnya adalah anggota dari tim pelaksana dan tim teknis yang sayangnya keberadaan mereka kurang mendapat tempat di masyarakat. Peneliti berusaha menggali lebih dalam terkait hal ini, namun demikian informasi yang didapatkan adalah lebih karena rasa cemburu mayoritas warga yang merasa anggota tim dipilih karena dianggap kelompok yang dekat dengan lingkaran elit desa. Pada akhirnya keberadaan tim ini menjadi kurang didengar dan diperdulikan oleh

masyarakat. Selain itu, meskipun proyek pembangunan telah selesai dilaksanakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, namun ternyata masih banyak warga yang merasa bahwa pihak pemerintah desalah yang bertanggung jawab dalam hal pemeliharannya. Seorang narasumber dari Kelurahan Cibadak mengatakan demikian:

“Bantuan PPK memang hasilnya sudah dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat. Rasa tanggung jawab kami untuk turut melestarikan hasil pembangunan juga telah cukup ada. Namun demikian masih ada juga sebagian masyarakat yang tidak merasa mendapat manfaat dari hasil kegiatan PPK. Khususnya masyarakat dari desa lain dimana tidak mendapat jatah pembangunan jalan atau pembangunan sarana air bersih didesanya, atau oleh sebagian masyarakat lain yang merasa tidak dilibatkan dalam kegiatan PPK”.

Sejumlah narasumber khususnya dari Kelurahan Cibadak, Desa Karangtengah dan Desa Neglasari menyampaikan bahwa dikarenakan kurangnya kesadaran serta dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan PPK, hal ini juga berdampak pada lemahnya rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Masyarakat banyak merasa tidak perlu berkontribusi dalam menjaga dan memelihara jalan desa yang dibangun dengan dana PPK, begitu pula terhadap sarana lainnya seperti pembangunan jembatan gantung dan pembangunan sarana serta tanki air. Dalam hal kontribusi iuran untuk pemeliharaan, narasumber dari Desa Karangtengah dan Desa Neglasari mengakui bahwa ada tarikan iuran untuk warga ddesanya, namun ia kurang mengetahui apakah iuran tersebut digunakan untuk pemeliharaan hasil pembangunan dari dana PPK atau digunakan untuk iuran warga guna kepentingan lainnya.

Secara umum berdasarkan temuan lapangan ini peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan PPK di empat wilayah lokasi penelitian di Kecamatan Cibadak masih terasa kurang efektif dalam hal melibatkan partisipasi masyarakatnya, sehingga mengakibatkan hasil pembangunan kurang dirasa manfaat dan keberpemilikannya oleh masyarakat.

BAB 5

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ANALISIS SWOT

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, berikut adalah tabel perbandingan berdasarkan hasil temuan di empat lokasi penelitian yang menjadi dasar acuan dalam penentuan identifikasi permasalahan.

Tabel 5.1. Tahapan Proses PPK Kelurahan Cibadak

Tahapan PPK	Masyarakat	Kelurahan Cibadak Aparat	Pendamping
Diseminasi Informasi PPK	Sebatas tahu dari papan informasi kelurahan; pembicaraan antar warga tentang akan adanya program pembangunan.	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor kelurahan	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan
Perencanaan	Tidak tahu dan merasa tidak diundang.	Perannya dominan karena merasa harus mengarahkan warganya.	Peran fasilitator cenderung kaku dan formal, serta satu arah.
Penyiapan Usulan & Verifikasi	Banyak tidak tahu proses penyiapan usulan dan siapa saja yang harus terlibat.	Dominan dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota tim verifikasi dan dalam mengarahkan usulan kegiatan.	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan keputusan terkait kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.
Pemilihan Proyek	Banyak yang tidak tahu dan tidak dapat hadir karena waktu pelaksanaan yang tidak tepat.	Dominan dalam menentukan pilihan kegiatan.	Merasa telah cukup aktif untuk memastikan berjalannya proses ini, namun lebih menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.
Pelaksanaan & Pengawasan	Warga yang terpilih sebagai tim pelaksana dan pengawas adalah karena berdasarkan hubungan kedekatan dengan aparat.	Dominan dalam menentukan anggota tim pelaksana dan pengawas.	Dilibatkan sebagai anggota tim pengawas.
Pemeliharaan	Warga tidak tahu dapat berperan dalam tahapan ini; Warga merasa tidak terlalu menyukai anggota tim yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan hasil proyek.	Dominan dalam menentukan anggota tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan dalam melakukan fungsi pemeliharaan terhadap hasil pembangunan.	Pasif.

Tabel 5.2. Tahapan Proses PPK Desa Karangtengah

Tahapan PPK	Desa Karangtengah		
	Masyarakat	Aparat	Pendamping
Diseminasi Informasi PPK	Sebatas tahu dari papan Informasi desa	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor kelurahan	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan
Perencanaan	Merasa tidak didengar suara/keinginannya.	Perannya dominan karena harus dapat menengahi perbedaan keinginan diantara warga.	Peran pendamping cenderung kaku dan formal, serta satu arah; pendamping mendapatkan kesulitan untuk mengakomodasi keinginan warga yang berbeda.
Penyiapan Usulan & Verifikasi	Merasa kecewa karena meski telah memberikan usulan kegiatan, tetapi tidak didengar oleh fasilitator.	Dominan dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota tim verifikasi dan dalam mengarahkan usulan kegiatan.	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan keputusan terkait kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.
Pemilihan Proyek	Warga enggan untuk hadir karena merasa tidak didengar suaranya dalam pertemuan sebelumnya.	Dominan dalam menentukan pilihan kegiatan.	Dalam tahapan ini menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.
Pelaksanaan & Pengawasan	Warga tidak tahu bahwa harus terlibat dalam tahapan ini.	Dominan dalam pelaksanaan tahapan ini, termasuk dalam menentukan anggota tim pelaksana dan pengawas.	Pasif.
Pemeliharaan	Warga tidak tahu bahwa harus terlibat dalam tahapan ini, dan kurang memiliki rasa keberpemilikan terhadap hasil pembangunan; warga turut berkontribusi memberikan sumbangan dana untuk pemeliharaan hasil pembangunan.	Dominan dalam menentukan dan mensosialisasikan besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan hasil pembangunan.	Pasif.

Tabel 5.3. Tahapan Proses PPK Desa Pamuruyan

Tahapan PPK	Masyarakat	Desa Pamuruyan Aparat	Pendamping
Diseminasi Informasi PPK	Sebatas tahu dari papan informasi desa	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor desa	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan
Perencanaan	Merasa tidak didengar suara/keinginannya.	Perannya dominan karena harus dapat menengahi perbedaan pendapat diantara warganya.	Peran fasilitator cenderung kaku dan formal, serta satu arah; pendamping mendapatkan kesulitan untuk mengakomodasi keinginan warga yang berbeda.
Penyiapan Usulan & Verifikasi	Banyak warga tidak tahu adanya tahapan ini. Warga yang terlibat berdasarkan undangan/ajakan langsung Kepala Desa. Warga yang diundang adalah karena status sosialnya (toga/tomas)	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan keputusan terkait kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.	Lebih banyak merasa harus mengikuti keputusan Kepala Desa yang dianggap telah mewakili suara mayoritas warga.
Pemilihan Proyek	Banyak yang tidak tahu dan tidak dapat hadir karena waktu pelaksanaan yang tidak tepat.	Dominan dalam menentukan pilihan kegiatan.	Dalam tahapan ini menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.
Pelaksanaan & Pengawasan	Warga tidak merasa ingin terlibat karena juga tidak dilibatkan dalam kegiatan terdahulu.	Dominan karena merasa sebagai penanggung jawab kegiatan dan harus dapat melaporkan secara berkala progress kegiatan kepada tim kordinator kecamatan.	Pasif.
Pemeliharaan	Warga tidak tahu bahwa harus terlibat dalam tahapan ini, dan kurang memiliki rasa keberpemilikan terhadap hasil pembangunan.	Dominan dalam menentukan anggota tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan dalam melakukan fungsi pemeliharaan terhadap hasil pembangunan.	Pasif.

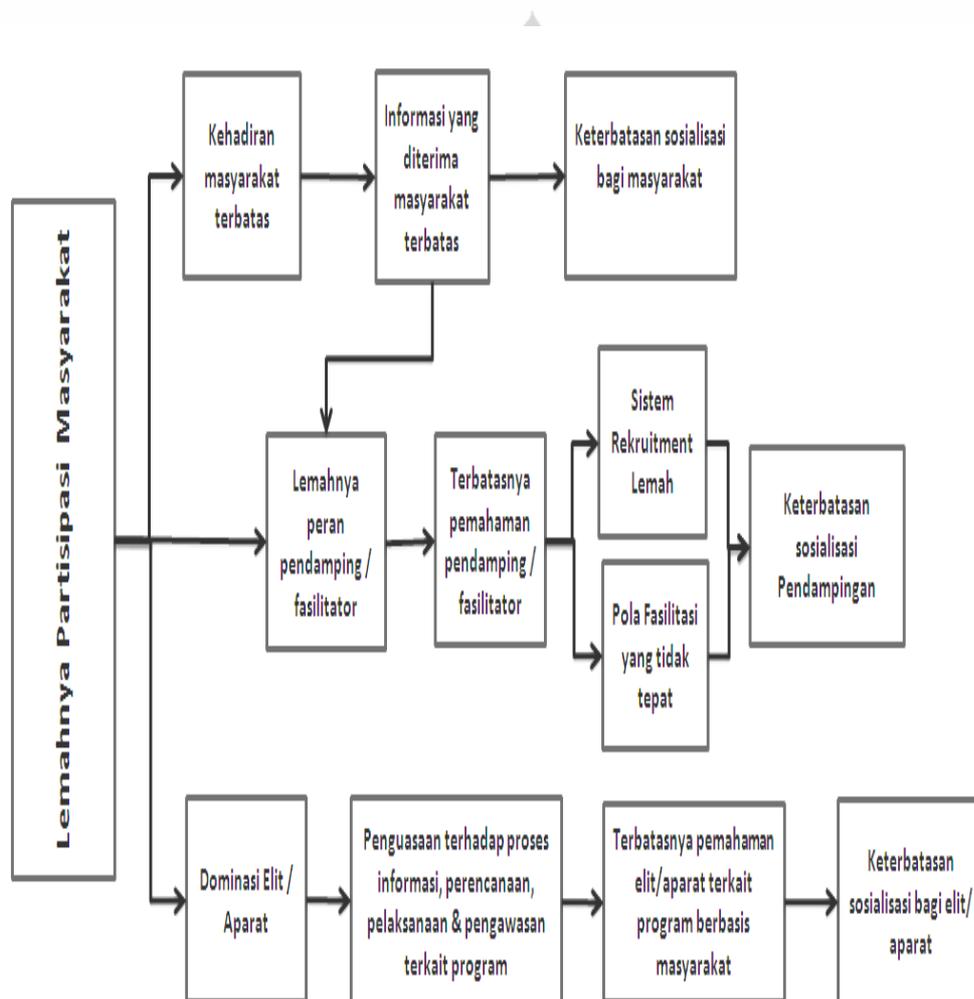
Tabel 5.4. Tahapan Proses PPK Desa Neglasari

Tahapan PPK	Masyarakat	Desa Neglasari Aparat	Pendamping
Diseminasi Informasi PPK	Sebatas tahu dari papan informasi desa	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; mengin formasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor desa	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan
Perencanaan	Tidak diundang dan tidak merasa perlu hadir.	Peran dominan karena merasa harus dapat mempertanggungja wabkan hasil perencanaan secepatnya kepada pihak tim kordinator kecamatan.	Peran pendamping cenderung kaku dan formal, serta satu arah; pendamping merasa kesulitan menggali keinginan warga yang pasif.
Penyiapan Usulan & Verifikasi	Warga tidak banyak yang tahu adanya proses ini.	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan keputusan terkait kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.	Lebih banyak merasa harus mengikuti keputusan Kepala Desa yang dianggap telah mewakili suara mayoritas warga.
Pemilihan Proyek	Warga tidak banyak yang tahu adanya proses ini.	Karena banyak warga yang tidak dapat hadir, Kepala Desa lebih menentukan penetapan kegiatan proyek.	Dalam tahapan ini menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.
Pelaksanaan & Pengawasan	Warga yang dilibatkan sebagai anggota tim pengawas adalah berdasarkan ajakan aparat karena status sosialnya (toga/tomas)	Dominan karena merasa sebagai penanggung jawab kegiatan dan harus dapat melaporkan secara berkala progress kegiatan kepada tim kordinator kecamatan.	Pasif.
Pemeliharaan	Keterlibatan warga sebatas turut dalam memberikan sejumlah dana sebagai kontribusi untuk pemeliharaan hasil pembangunan.	Dominan dalam menentukan anggota tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan dalam melakukan fungsi pemeliharaan terhadap hasil pembangunan.	Pasif.

5.1. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan guna mengetahui akar permasalahan yang ada dari pelaksanaan kegiatan PPK dan peran partisipasi masyarakat di Kecamatan Cibadak. Dengan diketahuinya akar permasalahan maka juga dapat dirumuskan solusi-solusi penyelesaian masalah.

Untuk memudahkan proses perumusan masalah yang ada di Kecamatan Cibadak, digunakan diagram sebagai berikut:



Gambar Diagram 5.1. Identifikasi Permasalahan

Dari diagram diatas permasalahan umum di Kecamatan Cibadak adalah lemahnya peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PPK. Sedangkan yang terlihat menjadi akar permasalahan adalah adanya keterbatasan sosialisasi program baik bagi masyarakat, elit/aparat desa/kecamatan, dan juga pendamping/fasilitator yang seharusnya dapat menjembatani antara masyarakat dan elit/aparat desa/kecamatan.

Pemahaman masyarakat yang rendah yang diakibatkan adanya keterbatasan informasi terkait kegiatan PPK mengakibatkan kehadiran dan partisipasi masyarakat minim dalam forum-forum musyawarah ataupun pelaksanaan kegiatan PPK. Berdasarkan hasil temuan lapangan pada bab sebelumnya, masyarakat banyak mengeluh tidak cukup mendapatkan informasi secara luas dan dalam terkait apa itu program PPK. Masyarakat kurang memiliki pemahaman bahwa dalam program PPK, merekalah perencana yang utama untuk menentukan prioritas kegiatan sekaligus pembangunan. Sejumlah narasumber utama mengatakan bahwa sosialisasi program terkait pelaksanaan PPK lebih diberikan dalam bentuk informasi yang terbatas pada papan pengumuman di sejumlah kantor desa, dan tidak secara menyeluruh dan dalam diberikan bagi masyarakat.

Demikian pula dengan adanya keterbatasan sosialisasi bagi elit/aparat yang membuat mereka kurang memahami bahwa program PPK adalah program yang berbasis pada partisipasi masyarakat dimana masyarakat menjadi pelaku sekaligus sasaran utama dari program ini. Keterbatasan sosialisasi bagi elit/aparat ini pada akhirnya mengakibatkan adanya dominasi mereka terhadap pelaksanaan kegiatan PPK dikarenakan dibandingkan masyarakat mereka memiliki penguasaan dan pengetahuan lebih terkait program PPK itu sendiri (waktu program, biaya program, proses perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya). Peran aparat desa, khususnya Kepala Desa, adalah sangat berpengaruh khususnya sepanjang menyangkut pengelolaan proyek pembangunan. Kepala Desa adalah pusat kegiatan desa yang seyogyanya dapat mengerahkan dan mengarahkan warga desanya dan dapat memberikan dorongan bagi partisipasi desa dan legitimasi proyek. Sebaliknya, kepala desa juga dapat mendominasi proses pelaksanaan, melalui beberapa cara: menunjuk pelaku PPK,

terutama jika pada pertemuan PPK yang pertama warga yang hadir sedikit; menekan atau mengganti pelaku PPK pada saat proyek sedang berjalan; dan mengambil keputusan sendiri ketika mengerahkan warga desa untuk melaksanakan proyek.

Sementara itu peran pendamping atau fasilitator juga terlihat lemah. Pendamping atau Fasilitator Desa memegang peranan yang penting dalam melibatkan warga desa ketika warga diberi cukup keleluasaan untuk memainkan peran oleh elit desa. Peran fasilitasi ini menjadi sangat penting untuk melibatkan warga desa khususnya untuk memastikan masyarakat mendapat pengalaman yang positif saat terlibat yakni dengan dapat menggali aspirasi masyarakat terkait prioritas pembangunan sesuai keinginan mayoritas masyarakat. Seyogyanya pendamping dapat menjembatani kelemahan masyarakat yang dalam banyak hal masih lemah dalam menyampaikan aspirasinya, juga menjembatani adanya dominasi aparat terhadap pelaksanaan kegiatan, namun demikian adanya keterbatasan pemahaman pendamping terkait proses kegiatan PPK yang disebabkan lemahnya sosialisasi pendamping turut berkontribusi membuat peran partisipasi masyarakat juga semakin lemah. Berdasarkan informasi dari narasumber utama, sejumlah kendala terkait teknis rekrutmen seperti informasi lowongan dan persyaratan untuk posisi pendamping tidak cukup tersebar luas dan jelas, sehingga membatasi jumlah individu yang tertarik dan kompeten. Juga adanya faktor sosial budaya dimana tidak cukup banyak pendamping / fasilitator yang memahami budaya setempat dan memiliki cukup pengetahuan tentang struktur masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan juga menjadi penghalang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pola fasilitasi pendamping juga diakui narasumber cenderung bersifat satu arah, formal dan terlalu teknis sehingga mengakibatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum dapat tergali secara optimal. Seyogyanya evaluasi terhadap kinerja pendamping dapat dilakukan secara berkala dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dalam tahap selanjutnya. Namun demikian fasilitator sendiri kurang mendapat supervisi yang sistematis dari penyelenggara program yang terlihat dari kurang tepatnya panduan pendamping / fasilitator. Hal ini berdampak terhadap kualitas peran pendamping / fasilitator.

5.2. Skala Prioritas Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, peneliti bersama sejumlah narasumber utama mengkaji penentuan skala prioritas masalah sebagaimana dituangkan dalam tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.5. Skala Prioritas Masalah

Akar Masalah	Dirasakan Banyak Orang	Kebutuhan Mendesak
Terbatasnya sosialisasi program bagi masyarakat	Banyak	Memastikan informasi terkait program berbasis masyarakat semacam PPK telah tersebar dan dipahami secara luas, khususnya oleh kelompok masyarakat miskin dan perempuan selaku target program PPK.
Terbatasnya sosialisasi program terhadap aparat/elit desa/kecamatan	Banyak	Memastikan kegiatan terkait program pembangunan telah melibatkan masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan.
Terbatasnya sosialisasi program bagi pendamping/fasilitator desa	Banyak	Memastikan pendamping mampu berperan secara aktif, khususnya dalam menjembatani antara keperluan teknis program dan tuntutan/kebutuhan/aspirasi masyarakat.

5.3. Alternatif Solusi untuk Meningkatkan Peranan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan Skala Prioritas Permasalahan yang dirasakan oleh paling banyak masyarakat sebagaimana disampaikan diatas, maka beberapa alternatif solusi untuk meningkatkan peran partisipasi masyarakat Kecamatan Cibadak dalam kegiatan semacam PPK disajikan dalam tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 5.6. Alternatif Solusi

No.	Akar Masalah	Alternatif Solusi
1	Terbatasnya sosialisasi program bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan paket-paket informasi terkait program pembangunan telah tersedia secara luas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat miskin dan perempuan, misalnya dalam bentuk sosialisasi seperti tatap muka dengan warga dalam berbagai kesempatan. ▪ Sosialisasi melalui media cetak (brosur, komik) atau elektronik (siaran radio dan televisi daerah).
2	Terbatasnya sosialisasi program terhadap aparat/elit desa/kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan pelaksanaan kuota kehadiran dalam setiap pertemuan dimana harus dapat menghadirkan warga masyarakat dalam kategori miskin (40%) dan perempuan (30%) ▪ Memastikan bahwa akses pelaksanaan pertemuan diadakan dalam waktu yang paling tidak merugikan masyarakat miskin dan perempuan untuk dapat hadir, misalnya diadakan pada sore hari, dan diadakan dalam jarak tempuh yang sedekat-dekatnya dengan komunitas mayoritas masyarakat miskin dan perempuan, dan menggunakan bahasa yang relatif mudah dipahami oleh masyarakat miskin/perempuan.
3	Terbatasnya sosialisasi program bagi pendamping/fasilitator desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggali potensi fasilitator yang dapat memahami keadaan sosial budaya masyarakat lokal sehingga secara tepat dapat mengadaptasi proses yang diperlukan program sesuai dengan kondisi masyarakat. ▪ Membuat panduan fasilitasi yang sederhana dan bersifat partisipatoris sehingga mudah

Sambungan Tabel 5.6

		<p>digunakan oleh fasilitator dan juga mudah dipahami oleh masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat kajian berkala terkait kinerja fasilitator dengan melibatkan masyarakat (peserta) untuk memberikan masukan/penilaian terhadap fasilitator.
--	--	---

5.4. Analisis SWOT

Analisis SWOT dari alternatif solusi sebagaimana telah disampaikan diatas juga dilakukan dalam bahasan ini guna menemukan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan dari alternatif solusi tersebut guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan semacam PPK.

Tabel 5.7. Analisis SWOT dari Alternatif Solusi (1).

Sosialisasi Program Bagi Masyarakat

(Penyediaan Paket Informasi: Pendampingan/Media Cetak/Elektronik)

	<u>STRENGTH</u>	<u>WEAKNESS</u>
Internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Budaya masyarakat yang cukup terbuka dalam menerima informasi yang berkaitan dengan kehidupan langsung mereka. ▪ Kemampuan aksara masyarakat hampir bebas buta huruf (Data Kecamatan Cibadak Dalam Angka 2006, AMH 2006: 96,71%). ▪ Masyarakat terbiasa menerima informasi lewat sarana media eletronik (radio, televisi). ▪ Masyarakat mudah berinteraksi secara langsung dan terbuka dengan orang dari luar komunitasnya. ▪ Siaran radio beragam, termasuk dari Radio Komunitas yang terdapat di daerah ini. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketersediaan terbatas untuk tenaga pendamping ditengah-tengah masyarakat yang mampu membangun partisipasi dan komunikatif. ▪ Pendanaan terbatas untuk penyediaan tenaga pendamping penuh waktu. ▪ Pendanaan terbatas untuk penyampaian informasi melalui media eletronik dalam rentang waktu panjang.

Sambungan Tabel 5.7

External	<u>OPPORTUNITIS</u>	<u>THREATS</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat sendiri dapat dilibatkan dalam penyediaan informasi dan penyebaran informasi lewat pelatihan maupun aktifitas langsung. ▪ Memungkinkan menggali potensi pembiayaan langsung dari masyarakat lewat penyediaan bahan-bahan dalam bentuk yang sederhana sesuai kreativitas masyarakat. ▪ Pendamping dapat diambil dan dibina dari tengah-tengah masyarakat sendiri (tokoh adat/tokoh perempuan). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat memastikan informasi telah tersedia dan tersebar secara luas. ▪ Melibatkan SDM khusus yang mengerti komunikasi. ▪ Bila pesan yang dibuat tidak tepat justru dapat melemahkan program secara keseluruhan. ▪ Kemungkinan terjadinya <i>"information overload"</i> berkaitan dengan program maupun kegiatan Pemerintah/Pembangunan lainnya.

Tabel 5.8. Analisis SWOT dari Alternatif Solusi (2).

Sosialisasi Program bagi Aparat/Elit (Kuota Kehadiran)

Internal	<u>STRENGTH</u>	<u>WEAKNESS</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara teknis pemetaan kelompok perempuan dan masyarakat miskin telah teridentifikasi pada data kependudukan. ▪ Pelibatan / undangan dari otoritas (aparatus / elit) dianggap suatu kehormatan sosial oleh budaya / kebiasaan masyarakat setempat. ▪ Penerapan kuota tidak menimbulkan tambahan biaya yang berarti. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerapan kuota merupakan tindakan diluar kebiasaan dari rejim birokratis/aparatus, adanya kemungkinan keengganan dari pihak aparat/elit. ▪ Adanya kebiasaan pola pelibatan yang hanya terbatas pada kelompok/orang yang dianggap sepele. ▪ Adanya anggapan penerapan kuota kehadiran menambah waktu pelaksanaan program yang telah terjadwal.

Sambungan Tabel 5.8

External	<u>OPPORTUNITIS</u>	<u>THREATS</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya budaya lokal senang berinteraksi secara lisan dalam kelompok. ▪ Semangat keterbukaan dan kesetaraan mendorong pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. ▪ Jalur dan sarana komunikasi untuk mengundang cukup tersedia dan terjangkau. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cukup sulit mendapatkan waktu dari kelompok masyarakat miskin / perempuan untuk terlibat, mengingat tanggungjawab ekonomi dan sosial mereka. ▪ Wakil dari masyarakat miskin/kelompok perempuan hanya berasal dari orang-orang yang dikenal dekat / sepaham dengan aparat sehingga ada potensi terjadinya kolusi.

Tabel 5.9. Analisis SWOT dari Alternatif Solusi (2).

Sosialisasi Program bagi Aparat/Elit (Akses Waktu/Jarak/Bahasa)

Internal	<u>STRENGTH</u>	<u>WEAKNESS</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya kesamaan pola kesibukan / kegiatan masyarakat sehingga bisa diprediksi waktu/jam penyelenggaraan pertemuan. ▪ Lokasi pelaksanaan kegiatan dapat dipusatkan di Balai Desa dikarenakan letaknya yang dianggap netral, mudah diakses dan dikenal oleh masyarakat miskin / perempuan. ▪ Secara umum, masyarakat menguasai bahasa Indonesia, namun perlu dihindari penggunaan istilah asing/teknis. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Khususnya untuk masyarakat miskin dan perempuan lebih fasih menggunakan bahasa lokal. ▪ Pilihan waktu seringkali cenderung terbatas bagi perempuan, khususnya yang telah menikah dan memiliki anak. ▪ Kebanyakan perempuan cenderung sungkan untuk terlibat dalam suatu kegiatan diluar rumah bersama lelaki lain diluar lingkungan keluarga.

Sambungan Tabel 5.9

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat setempat mengenai adanya budaya / kebiasaan Hari Dusun / Hari Pasar, yang dapat dimanfaatkan juga untuk keperluan sosialisasi program. ▪ Budaya masyarakat yang senang berkumpul, termasuk bergotong royong. 	
External	<p style="text-align: center;"><u>OPPORTUNITIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moda transportasi dan komunikasi cukup tersedia luas dalam masyarakat. ▪ Potensi dari tokoh perempuan lokal untuk menjadi pendorong dari program, khususnya dalam menggerakkan perempuan untuk hadir dan menterjemahkan bahasa teknis program kepada peserta yang lebih luas. 	<p style="text-align: center;"><u>THREATS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jadwal program secara keseluruhan dapat terulur-ulur bila harus mengakomodasi perbedaan kepentingan dan ketersediaan waktu. ▪ Untuk kemudahan akses bahasa, belum tentu tersedia sumber daya yang dapat membantu proses penyederhanaan.

**Tabel 5.10. Analisis SWOT dari Alternatif Solusi (3).
Sosialisasi Program bagi Pendamping (Menggali Potensi Fasilitator)**

	<p style="text-align: center;"><u>STRENGTH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengalaman fasilitasi sudah cukup berkembang dalam masyarakat seperti adanya pendamping-pendamping terdahulu untuk bidang pertanian, KB, UKM, dll. ▪ Cukup tersedia orang dengan kualifikasi pendidikan SMA/Lebih dari tengah masyarakat untuk menjadi fasilitator yang telah dikenal oleh masyarakat. 	<p style="text-align: center;"><u>WEAKNESS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlu waktu dan sumber daya yang cukup besar untuk seleksi fasilitator yang tepat. ▪ Perlu penyediaan dana untuk honorarium fasilitator, khususnya untuk yang memiliki kualifikasi tinggi. ▪ Kemampuan fasilitator berinteraksi dengan masyarakat biasanya baru
Internal		

Sambungan Tabel 5.10

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pendampingan dan pelatihan sudah lebih teratur, termasuk adanya fasilitator tingkat kabupaten yang dapat memberikan bantuan dan pendampingan untuk fasilitator tingkat kecamatan/desa yang terpilih secara cepat. 	<p>teruji saat turun ke lapangan, dan seringkali berbeda dengan kemampuan yang terekam saat seleksi fasilitator.</p>
External	<p style="text-align: center;"><u>OPPORTUNITIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat relatif terbuka pada keberadaan orang baru (fasilitator). ▪ Masyarakat juga cukup terbuka terhadap informasi terutama yang berkaitan dengan pembangunan disekitarnya. 	<p style="text-align: center;"><u>THREATS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aparat Kecamatan/Desa maupun pendamping yang sebelumnya telah ada merasa pengaruhnya semakin kecil di masyarakat dengan adanya keberadaan fasilitator. ▪ Kandidat fasilitator yang baik lebih tertarik pada kesempatan kerja lebih baik di tempat lain khususnya bila telah melewati satu tahun masa tugas.

Tabel 5.11. Analisis SWOT dari Alternatif Solusi (3).

Sosialisasi Program bagi Pendamping (Panduan Fasilitasi yang Sederhana)

	<p style="text-align: center;"><u>STRENGTH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengalaman pendampingan masyarakat telah cukup berakar melalui pendamping-pendamping di program terdahulu (KB, dll). ▪ Panduan umum sudah tersedia saat program dimulai. ▪ Sudah ada contoh-contoh panduan fasilitasi dari daerah lain yang dapat cepat diadopsi. 	<p style="text-align: center;"><u>WEAKNESS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan panduan memerlukan keahlian khusus terutama untuk penyederhanaan informasi dan bahasa, serta untuk penyesuaian dengan konteks daerah. ▪ Penyusunan panduan menambah waktu dan biaya program.
Internal		

Sambungan Tabel 5.11

		<ul style="list-style-type: none"> Adanya kemungkinan panduan tidak digunakan setelah dibuat.
External	<p style="text-align: center;"><u>OPPORTUNITIS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dapat mengadopsi cara pendampingan yang dilakukan oleh tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh perempuan setempat. Dapat berkolaborasi dengan pihak pelaku media atau pegiat isu kemasyarakatan (aktivis) untuk membuat panduan fasilitasi yang praktis, aplikatif dan tepat sasaran. 	<p style="text-align: center;"><u>THREATS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Panduan yang kurang tepat dalam hal informasi, petunjuk, dan penyesuaian konteks budaya berakibat kerja fasilitator terhambat. Fasilitator mengabaikan panduan karena lebih mengandalkan pengetahuan dan ketrampilan dari sumber lain atau pengalaman langsung dilapangan.

**Tabel 5.12. Analisis SWOT dari Alternatif Solusi (3).
Sosialisasi Program bagi Pendamping (Kajian Kinerja Fasilitator)**

	<u>STRENGTH</u>	<u>WEAKNESS</u>
Internal	<ul style="list-style-type: none"> Petunjuk umum telah mensyariatkan pentingnya melakukan fungsi monitoring dan evaluasi. Adanya pegawai Kecamatan yang telah terbiasa melakukan fungsi monitoring yang dapat menjadi rujukan. Adanya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program dengan dilibatkan dalam proses kajian kinerja fasilitator di daerahnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kerangka kajian dan evaluasi memerlukan keahlian khusus untuk memastikan ketepatannya pada kebutuhan program. Penyusunan kerangka kajian menambah waktu dan biaya program. Sumber pendanaan kajian kinerja fasilitator tidak jelas tersedia.

Sambungan Tabel 5.12

External	<u>OPPORTUNITIS</u>	<u>THREATS</u>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kajian kinerja bermanfaat bagi monitoring program secara lebih luas khususnya untuk tingkat Kabupaten/Provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan kemampuan teknis pada penyelenggara program dalam pelaksanaan kajian membatasi hasilnya. ▪ Fasilitator bersikap antipati pada kajian kinerja mereka ▪ Potensi terjadinya <i>bias</i> terhadap kinerja fasilitator karena adanya sifat monitoring yang langsung dari masyarakat.

5.5. The Best of Solution

Peneliti berpendapat bahwa sebagai solusi terbaik guna meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan semacam PPK, khususnya untuk Kecamatan Cibadak adalah dengan secara bersamaan memastikan: a). penerapan alternatif solusi (2) yakni memastikan mekanisme kuota kehadiran dalam setiap pertemuan sesuai dengan Analisa SWOT Table 5.4. Juga dengan b) penerapan alternatif solusi (1) yakni penerapan paket informasi terkait program pembangunan secara luas dan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan Analisa SWOT Table 5.3.

Pemilihan kuota kehadiran sebagai *the best solution* (1) dipilih oleh karena peneliti berpendapat kuota kehadiran penting agar masyarakat miskin dan kelompok perempuan benar-benar dapat terwakili dan dapat memberikan suaranya. Berdasarkan analisa swot untuk alternatif solusi ini, yakni sebagaimana tercantum dalam tabel 5.4., kuota kehadiran memiliki kekuatan bahwa secara teknis telah ada pemetaan kelompok perempuan dan masyarakat miskin yang telah teridentifikasi pada data kependudukan setempat. Juga bahwa adanya *social capital* masyarakat setempat dimana pelibatan atau undangan dari pihak otoritas (aparatus/elit) dianggap sebagai suatu kehormatan dan oleh karenanya masyarakat akan lebih semangat untuk hadir, dan nantinya diharapkan memiliki rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. Dari sisi pembiayaan,

penerapan solusi ini juga tidak menimbulkan biaya tambahan yang berarti dari sisi aparat sehingga dapat lebih mudah diterapkan.

Kuota kehadiran juga perlu memperhatikan kualitas dari mereka yang akan terpilih mewakili kelompok miskin dan perempuan. Peneliti juga merasa penting untuk menekankan bahwa penentuan kuota kehadiran juga didasarkan pada kemampuan mereka yang akan mewakili kelompok tersebut. Kemampuan itu setidaknya meliputi kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, memiliki pemahaman tentang kebiasaan dan budaya masyarakat setempat, juga memiliki kecakapan komunikasi termasuk kemampuan menyatakan pendapat dalam forum, serta memiliki kecukupan bobot kepercayaan dari kelompoknya. Proses pemilihan dengan kriteria tersebut diatas dapat dilakukan dengan sebelumnya melakukan pertemuan terbuka dengan kelompok masyarakat terkait dan menyampaikan usulan kriteria tersebut, kemudian mengundang kelompok untuk dapat mencalonkan pilihannya sendiri berdasarkan kriteria tersebut, atau jika kemudian diputuskan untuk menambah atau mengurangi bobot kriteria tersebut. Dengan demikian keputusan siapa yang menjadi wakil mereka akan diputuskan masyarakat sendiri, yang nantinya diharapkan dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil program dan juga proses yang berjalan. Aparat atau elit juga perlu memperhatikan dan mengawal proses ini dengan sungguh-sungguh sehingga partisipasi masyarakat yang terjadi tidak hanya sekedar memenuhi standard kuantitas atau kuota, tetapi juga bernilai dalam sisi kualitas. Persyaratan-persyaratan inilah yang perlu dicatat dan diterapkan pada sosialisasi program yang ditujukan bagi aparat dan elit.

Sementara pemilihan dari alternatif solusi pemberian paket informasi sebagai *the best solution* (2) yakni dengan pemberian paket informasi dalam bentuk pendampingan langsung seperti forum tatap muka di Balai Desa antara penyelenggara program dan masyarakat, atau jika memungkinkan menggunakan pola "jemput bola". Penting pula untuk memastikan agar para pendamping memiliki kecakapan dalam berkomunikasi termasuk kemampuan persuasif dan informatif, sehingga terutama masyarakat miskin dan perempuan dapat memiliki pemahaman yang cukup tentang program dan dapat juga mengusulkan orang-orang diantara mereka untuk mengikuti proses didalam program lebih lanjut.

Melalui mekanisme semacam ini maka kualitas informasi yang diterima masyarakat dapat lebih dalam dan terjamin akurasi. Paket informasi juga dapat diberikan dalam bentuk sosialisasi yang memanfaatkan keberadaan media cetak maupun elektronik yang dapat terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan analisa swot sesuai dengan tabel 5.3. yang menjadi kekuatan dengan penerapan solusi ini adalah adanya *social capital* dimana masyarakat cukup terbuka dalam menerima informasi, khususnya jika berkaitan dengan kehidupan mereka, juga cenderung mudah berinteraksi secara langsung dan terbuka dengan pihak orang diluar komunitasnya, sehingga pendamping dapat mudah mendekati mereka. Selain itu adanya kebiasaan masyarakat setempat dalam mengakses informasi melalui media elektronik, seperti radio dan televisi, dan media cetak sederhana, seperti dalam bentuk komik, brosur bergambar ataupun koran lokal/buletin desa dengan bahasa daerah setempat. Stasiun radio komunitas lokal telah ada di wilayah Kecamatan Cibadak yang diprakarsai oleh KBR 68H, suatu jaringan pengembang radio komunitas yang telah tersebar di banyak daerah di seluruh Indonesia. Koran daerah juga mudah ditemukan di daerah ini. Dengan demikian penerapan solusi ini bukan suatu hal yang sulit dikarenakan penyerapan masyarakat terhadap informasi tidak akan menjadi suatu masalah dikarenakan mayoritas masyarakat telah melek huruf. Sedangkan dari sisi pendanaan meski ada resiko dari keperluan pembiayaan pendamping untuk penuh waktu, namun upaya pendampingan dapat dibangun berdasarkan masyarakat sehingga kebutuhan dana langsungnya dapat berkurang. Sementara untuk resiko pada pembiayaan untuk komunikasi melalui media elektronik dapat diatasi dengan bekerjasama bersama pihak penggiat radio komunitas yang memang memiliki program pemberdayaan masyarakat.

Maka dengan adanya informasi yang diterima masyarakat yang lebih dalam dan luas, dan adanya kehadiran masyarakat dalam suatu mekanisme kuota kehadiran, dapat memastikan masyarakat untuk dapat lebih mengenal, memiliki dan menuntut pihak penyelenggara untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih melibatkan dan memperhatikan kepentingan mereka.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan kegiatan PPK di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi masih belum dilaksanakan dengan secara optimal, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Tahapan proses khususnya diseminasi informasi, perencanaan, penyiapan usulan dan verifikasi, pemilihan proyek, pelaksanaan dan pengawasan proyek serta pemeliharaan di masing-masing desa belum dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Campur tangan dan intervensi aparat / elit desa dan kecamatan masih banyak terlihat berperan dalam setiap tahapan tersebut.
 - b. Proses sosialisasi dari Program Pengembangan Kecamatan perlu mendapat perhatian utama, khususnya diawal-awal program sebelum dilaksanakan. Kebanyakan masyarakat, aparat dan elit, termasuk pendamping / fasilitator masih terlihat tidak memiliki kecukupan informasi tentang apa itu PPK dan memahami program ini sebagai program bantuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Proses sosialisasi serta diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk dipastikan berjalan dengan baik karena ketidak-lancaran pelaksanaan kegiatan banyak diakibatkan oleh proses sosialisasi dan diseminasi informasi yang seringkali dijalankan secara sepihak oleh perencana program pemberdayaan masyarakat, bersifat searah dan instruktif.
 - c. Kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk peran pendamping/fasilitator untuk program pembangunan khususnya di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih berperan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan semacam PPK.

2. Partisipasi masyarakat Kecamatan Cibadak dalam pelaksanaan kegiatan PPK masih rendah, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Aspirasi masyarakat masih belum diutamakan dan menjadi fokus dari pelaksanaan kegiatan PPK. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh dan optimal. Dengan demikian pemilihan proyek kegiatan PPK juga belum secara lengkap mewakili kepentingan masyarakat yang diputuskan berdasarkan kesepakatan seluruh warga masyarakat.
 - b. Dalam hal partisipatoris dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh jarak, waktu dan tempat, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas untuk diajukan ke proses perencanaan pembangunan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan masyarakat belum memperoleh peluang yang sama dalam menyampaikan pemikiran dan gagasannya. Kebanyakan perwakilan masyarakat yang hadir dalam forum semacam Musrenbang atau Musrendus belum benar-benar mewakili keseluruhan populasi masyarakat.

6.2. Rekomendasi / *Skenario Action Plan*

Dari temuan penelitian disarankan beberapa hal sebagai berikut yang dituangkan dalam bentuk tabel *Scenario Action Plan* guna perbaikan tingkat partisipasi masyarakat untuk program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat semacam PPK di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.

Tabel 6. Skenario Action Plan

Akar Masalah	Solusi / Alternatif Solusi	Kegiatan	Proyeksi	Stakeholder
Terbatasnya sosialisasi program bagi masyarakat	Memastikan paket-paket informasi terkait program pembangunan tersedia secara luas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat miskin dan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan bahan-bahan sosialisasi baik cetak maupun elektronik yang memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat, dan sebaiknya melibatkan seorang ahli komunikasi dalam pembuatannya. 	Jangka Pendek	Aparat. Konsultan Kabupaten. Pendamping Kabupaten dan Kecamatan. Perwakilan masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan <i>testing</i> terhadap bahan-bahan sosialisasi sebelum disebarluaskan, agar dapat dipastikan keakuratan informasi dan ketepatan bahasa serta format yang sesuai bagi masyarakat miskin/perempuan. 	Jangka Pendek	Aparat. Pendamping. kelompok masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan komunikasi untuk pendamping terutama berkaitan dengan mengajak kepesertaan perempuan dan kelompok miskin. 	Jangka Pendek	Konsultan Kecamatan. Aparat. Pendamping. masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan sosialisasi langsung di fasilitas desa dimana terdapat banyak warga biasa berkumpul (balai desa/posyandu) atau pada hari-hari pasar sesuai kebiasaan masyarakat setempat. 	Jangka Menengah	Aparat. Pendamping. Masyarakat. Konsultan Kecamatan.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan sosialisasi melalui penyebaran via media cetak (brosur, komik, koran lokal) 	Jangka Menengah	Konsultan Kecamatan. Pendamping. Masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan sosialisasi melalui penyebaran via media elektronik (radio komunitas, siaran radio daerah) 	Jangka Menengah	Konsultan Kecamatan. Pendamping. Masyarakat.

Sambungan Tabel 6.

Terbatasnya sosialisasi program terhadap aparat/elit	Memberlakukan kuota kehadiran dalam setiap pertemuan dimana harus dapat menghadirkan warga masyarakat dalam kategori miskin dan kelompok perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi peserta potential dari kelompok masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dengan memperhatikan kemampuan peserta. 	Jangka Pendek	Aparat. Pendamping. kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
		<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi waktu dan tempat yang paling memungkinkan untuk dapat dihadiri oleh target peserta sehingga dapat memastikan kehadiran mereka. 	Jangka Pendek	Aparat. Pendamping. Masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Menjadikan kuota sebagai prasyarat pertemuan dan mendokumentasikan hal ini dalam setiap aturan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian dapat memastikan partisipasi kelompok target berdasarkan kuota ini. 	Jangka Pendek	PJOK PPK Tk. Provinsi, kabupaten dan kecamatan. Aparat desa. Pendamping. Masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan / mengkonfirmasi kehadiran target peserta sebelum pelaksanaan kegiatan. 	Jangka Menengah	Aparat. Pendamping. Perwakilan masyarakat. Konsultan Kecamatan. Pendamping. Aparat.
	Memastikan bahwa akses pelaksanaan pertemuan diadakan dalam waktu yang paling tidak merugikan masyarakat miskin dan perempuan untuk dapat hadir dan memberikan suaranya, dan memastikan penggunaan bahasa	<ul style="list-style-type: none"> Mendokumentasikan kehadiran dengan melakukan pendataan peserta berkelompok. 	Jangka Menengah	
		<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi tempat dan waktu pelaksanaan yang paling memungkinkan untuk dapat dihadiri oleh kelompok masyarakat miskin dan perempuan. 	Jangka Pendek	Aparat. Pendamping. Masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Menyebarkan informasi pola dan jadwal kegiatan jauh hari sebelumnya (minimal 1 bulan sebelum diadakannya pertemuan) 	Jangka Pendek	Pendamping. Aparat. Perwakilan masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan pembuatan bahan-bahan terkait program yang akan diberikan kepada masyarakat telah menggunakan bahasa 	Jangka Pendek	Aparat. Pendamping. Perwakilan masyarakat.

Sambungan Tabel 6.

	yang mudah dipahami dan dimengerti.	yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh kebiasaan masyarakat setempat.		
Terbatasnya sosialisasi bagi pendamping.	Menggali potensi pendamping agar dapat memfasilitasi dengan optimal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proses rekrutmen pendamping dibuat dengan lebih terbuka dan transparan dengan mengutamakan standar kompetensi yang lebih tepat. 	Jangka Pendek	PJOK Prov./Kab. Pendamping Kabupaten. Aparat desa. Wakil masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan pendahuluan bagi pendamping sebelum diterjunkan ke tengah masyarakat guna mensosialisasikan tujuan dan proses program. 	Jangka Menengah	PJOK Prov./Kab. Pendamping Kabupaten. Aparat desa. Wakil masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Field test</i> bagi pendamping selama kurang lebih seminggu untuk membiasakan pendamping dengan bahan dan masyarakat yang akan didampingi. ▪ Workshop perbaikan bahan dan kajian lapangan pasca <i>field test</i> bagi pendamping. 	Jangka Menengah	PJOK Kab. Pendamping Kab. Aparat desa. Wakil masyarakat.
	Membuat panduan fasilitasi yang sederhana dan partisipatoris agar dapat mudah dibawa, digunakan dan menjadi acuan bagi pendamping saat bekerja di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penentuan konsultan yang akan membantu pembuatan panduan fasilitasi. 	Jangka Pendek	PJOK Prov/Kab. Pendamping Kab. Konsultan teknis. Aparat. Wakil masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Field test dari panduan. 	Jangka Pendek	Pendamping Kab. Aparat. Wakil masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian bahan panduan. 	Jangka Pendek	Pendamping Kab. Aparat. Wakil masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan panduan bagi pendamping. 	Jangka Pendek	Pendamping Kab. Aparat. Wakil masyarakat.

Sambungan Tabel 6.

Kajian berkala terkait kinerja pendamping.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring kinerja pendamping secara berkala. 	Jangka Menengah	PJOK Kab/Kec. Pendamping Kab/Kec/Desa. Aparat. Perwakilan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penilaian terhadap kinerja pendamping. 	Jangka Menengah	PJOK Kab/Kec. Pendamping Kab/Kec/Desa. Aparat. Perwakilan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian feedback bagi perbaikan kinerja. 	Jangka Menengah	PJOK Kab/Kec. Pendamping Kab/Kec/Desa. Aparat. Perwakilan masyarakat.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan <i>Peer Group</i> berkala bagi pendamping. 	Jangka Menengah	PJOK Kab/Kec. Pendamping Kab/Kec/Desa. Aparat. Perwakilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander.(2001). *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Adi, Isbandi, Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.
- Aryenti, dkk. (2000). *Jurnal Penelitian Permukiman*.
- Atmawikarta, S. (2007). *Pemberdayaan untuk Tekan Kemiskinan. Makalah pada Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Tahun 2007 dengan Proyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)*. Direktorat Kesehatan Bappenas, Jakarta.
- Bryson, John.M (penerjemah Miftahuddin). (1999). *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bappenas. (2004). *Rencana Strategis Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Chambers, Robert. (1993). *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Ditjen PMD Depdagri. (2006). *Sejarah Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia*. www.tkpkri.org
- _____. (2007). *Pedoman Nasional Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*. www.ppk.or.id
- Departemen Dalam Negeri. (2000). *Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*. Jakarta: Tim Koordinasi PPK Dirjend PMD.
- Gibson, dkk (alih bahasa Nunuk Adiarni). (1996). *Organisasi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hidayat, Syarif. (2000). *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Kedepan*. Jakarta: PT Pustaka Quantum Indonesia
- Hureirah, A. (2005). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAS-LSM Mata Air (Masyarakat Cinta Tanah Air), Bandung.

- Kamaluddin, Rustian. (2003). *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*. Jakarta: Gahlia Indonesia
- Kartasasmita, Ginanjar. (1998). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO.
- Koentjaraningrat. (1981). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Percetakan Gramedia.
- KM-PPK. (2007). *Laporan Konsultan Manajemen (KM) Program Pengembangan Kecamatan*. Jakarta.
- Maman, P Rukmana. (1997). *Jurnal Pengabdian*. LPKM, UNPAD.
- Milles, MB & Hubberman, AM (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjejep Rohidi dan Mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Miftah Toha. (1988). *Perspektif/Prilaku Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mikkelsen, Britha. (2006). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexi, J. (2000). *Metodologi Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyarto dan Sartono Kartodirjo. (1988). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Liberty dan P3PK UGM Yogyakarta.
- Nazir, M. (1998). *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2002). *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Jakarta: Bina Adiksara
- Riyadi dan Bratakusumah, D.S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet, Yulianus. (1992). *Konsep-konsep Dasar Partisipasi Sosial*. Yogyakarta: UGM PAU-IS.
- Syahdan, G. (2004). *Kemiskinan Desa, Menanggulangi Kemiskinan Desa*. Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, Lukman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.

- Soemarmo. (2005). *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang*. Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Steer, AD. (2006). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Ikhtisar*. Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Kawasan Asia Timur dan Pasifik. Penerbit: Gradasi Aksara, Jakarta.
- Stepanek, JF. (1985). *Kemiskinan, Pemerintah Memaparkan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, Jakarta.
- Sulistyowati, Endang.(2002). *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu sosial*.
- Swasono, Sri Edi, dkk. (1998). *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan Jender dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*. Jakarta:Universitas Indonesia.
- Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan, (2005). *Penjelasan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Modul I – IX*. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- The World Bank. (2007). *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*.
- The World Bank. (2007). *Inovasi Pelayanan Pro-miskin. Sembilan Studi Kasus di Indonesia*.
- Todaro, Michael, P, (1995). *Ekonomi Untuk Negara Berkembang, Suatu Pengantar Kuliah Prinsip-Prinsip Masalah dan Kebijakan Pembangunan*.Bina Aksara

Tahapan PPK	Kelurahan Cibadak			Desa Karangtengah			Desa Pamuruyan			Desa Neglasari		
	Masyarakat	Aparat	Pendamping	Masyarakat	Aparat	Pendamping	Masyarakat	Aparat	Pendamping	Masyarakat	Aparat	Pendamping
Diseminasi Informasi PPK	Sebatas tahu dari papan informasi kelurahan; pembicaraan antar warga tentang akan adanya program pembangunan.	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor kelurahan	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan	Sebatas tahu dari papan informasi desa	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor kelurahan	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan	Sebatas tahu dari papan informasi desa	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor desa	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan	Sebatas tahu dari papan informasi desa	Diberikan saat rapat di kecamatan oleh tim kordinator PPK tk. Kecamatan; menginformasikan secara verbal kepada warga saat pertemuan perencanaan; dan mencantumkan pengumuman terkait PPK pada papan informasi kantor desa	Diberikan saat pelatihan selama seminggu setelah pengangkatan
Perencanaan	Tidak tahu dan merasa tidak diundang.	Perannya dominan karena merasa harus mengarahkan warganya.	Peran fasilitator cenderung kaku dan formal, serta satu arah.	Merasa tidak didengar suara/keinginannya.	Perannya dominan karena harus dapat menengahi perbedaan keinginan diantara warga.	Peran pendamping cenderung kaku dan formal, serta satu arah; pendamping mendapatkan kesulitan untuk mengakomodasi keinginan warga yang berbeda.	Merasa tidak didengar suara/keinginannya.	Perannya dominan karena harus dapat menengahi perbedaan pendapat diantara warganya.	Peran fasilitator cenderung kaku dan formal, serta satu arah; pendamping mendapatkan kesulitan untuk mengakomodasi keinginan warga yang berbeda.	Tidak diundang dan tidak merasa perlu hadir.	Peran dominan karena merasa harus dapat mempertanggungjawabkan hasil perencanaan secepatnya kepada pihak tim kordinator kecamatan.	Peran pendamping cenderung kaku dan formal, serta satu arah; pendamping merasa kesulitan menggali keinginan warga yang pasif.
Penyiapan Usulan & Verifikasi	Banyak tidak tahu proses penyiapan usulan dan siapa saja yang harus terlibat.	Dominan dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota tim verifikasi dan dalam mengarahkan usulan kegiatan.	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.	Merasa kecewa karena meski telah memberikan usulan kegiatan, tetapi tidak didengar oleh fasilitator.	Dominan dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota tim verifikasi dan dalam mengarahkan usulan kegiatan.	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.	Banyak warga tidak tahu adanya tahapan ini. Warga yang terlibat berdasarkan undangan/ajakan langsung Kepala Desa. Warga yang diundang adalah karena status sosialnya (toga/tomas)	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan keputusan terkait kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.	Lebih banyak merasa harus mengikuti keputusan Kepala Desa yang dianggap telah mewakili suara mayoritas warga.	Warga tidak banyak yang tahu adanya proses ini.	Dominan karena merasa harus dapat segera menghasilkan keputusan terkait kegiatan agar dapat segera dilaksanakan.	Lebih banyak merasa harus mengikuti keputusan Kepala Desa yang dianggap telah mewakili suara mayoritas warga.
Pemilihan Proyek	Banyak yang tidak tahu dan tidak dapat hadir karena waktu pelaksanaan yang tidak tepat.	Dominan dalam menentukan pilihan kegiatan.	Merasa telah cukup aktif untuk memastikan berjalannya proses ini, namun lebih menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.	Warga enggan untuk hadir karena merasa tidak didengar suaranya dalam pertemuan sebelumnya.	Dominan dalam menentukan pilihan kegiatan.	Dalam tahapan ini menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.	Banyak yang tidak tahu dan tidak dapat hadir karena waktu pelaksanaan yang tidak tepat.	Dominan dalam menentukan pilihan kegiatan.	Dalam tahapan ini menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.	Warga tidak banyak yang tahu adanya proses ini.	Karena banyak warga yang tidak dapat hadir, Kepala Desa lebih menentukan penetapan kegiatan proyek.	Dalam tahapan ini menyerahkan proses pemilihan kepada aparat.
Pelaksanaan & Pengawasan	Warga yang terpilih sebagai tim pelaksana dan pengawas adalah karena berdasarkan hubungan kedekatan dengan aparat.	Dominan dalam menentukan anggota tim pelaksana dan pengawas.	Dilibatkan sebagai anggota tim pengawas.	Warga tidak tahu bahwa harus terlibat dalam tahapan ini.	Dominan dalam pelaksanaan tahapan ini, termasuk dalam menentukan anggota tim pelaksana dan pengawas.	Pasif.	Warga tidak merasa ingin terlibat karena juga tidak dilibatkan dalam kegiatan terdahulu.	Dominan karena merasa sebagai penanggung jawab kegiatan dan harus dapat melaporkan secara berkala progress kegiatan kepada tim kordinator kecamatan.	Pasif.	Warga yang dilibatkan sebagai anggota tim pengawas adalah berdasarkan ajakan aparat karena status sosialnya (toga/tomas)	Dominan karena merasa sebagai penanggung jawab kegiatan dan harus dapat melaporkan secara berkala progress kegiatan kepada tim kordinator kecamatan.	Pasif.

<p>Pemeliharaan</p>	<p>Warga tidak tahu dapat berperan dalam tahapan ini; Warga merasa tidak terlalu menyukai anggota tim yang bertanggungjawab untuk pemeliharaan hasil proyek.</p>	<p>Dominan dalam menentukan anggota tim yang bertanggung jawab dan dalam melakukan fungsi pemeliharaan terhadap hasil pembangunan.</p>	<p>Pasif.</p>	<p>Warga tidak tahu bahwa harus terlibat dalam tahapan ini, dan kurang memiliki rasa keberpemilikan terhadap hasil pembangunan; warga turut berkontribusi memberikan sumbangan dana untuk pemeliharaan hasil pembangunan.</p>	<p>Dominan dalam menentukan dan mensosialisasikan besaran jumlah dana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan hasil pembangunan.</p>	<p>Pasif.</p>	<p>Warga tidak tahu bahwa harus terlibat dalam tahapan ini, dan kurang memiliki rasa keberpemilikan terhadap hasil pembangunan.</p>	<p>Dominan dalam menentukan anggota tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan dalam melakukan fungsi pemeliharaan terhadap hasil pembangunan.</p>	<p>Pasif.</p>	<p>Keterlibatan warga sebatas turut dalam memberikan sejumlah dana sebagai kontribusi untuk pemeliharaan hasil pembangunan.</p>	<p>Dominan dalam menentukan anggota tim yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan dalam melakukan fungsi pemeliharaan terhadap hasil pembangunan.</p>	<p>Pasif.</p>
----------------------------	--	--	---------------	---	---	---------------	---	---	---------------	---	---	---------------

LAMPIRAN 2. PHOTO

Photo 1. Gotong Royong Masyarakat Kecamatan Cibadak dalam kegiatan PPK



Photo 2. Kondisi Jalan Desa Pamuruyan saat ini



Photo 3. Kondisi Jembatan Gantung di Kecamatan Cibadak Saat ini



Photo 4. Peneliti Bersama Kasi Pembangunan Kecamatan Cibadak, Bapak Fendy Effendy



Lampiran 3. Interview Guide

	Masyarakat	Aparat	Pendamping
Masyarakat (miskin & perempuan) sebagai target PPK	Menurut Bapak/Ibu apa masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat?	Menurut Bapak/Ibu apa masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat?	Menurut Bapak/Ibu apa masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat?
	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengetahui apa yang menjadi masalah dan merupakan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan?	Bagaimana cara untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan masyarakat?	Bagaimana cara untuk mengetahui dan menggali masalah dan kebutuhan masyarakat?
	Menurut Bapak/Ibu, apakah masalah dan kebutuhan masyarakat tersebut diusulkan dalam proses perencanaan di PPK? Siapa yang mengusulkan? Bagaimana penerimaan peserta lainnya?	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan?	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan?

Lanjutan Lampiran 3. Interview Guide

	Menurut Bapak/Ibu, apakah proses perencanaan sudah berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat secara mayoritas?	Menurut Bapak/Ibu, apakah proses perencanaan sudah berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat secara mayoritas?	Menurut Bapak/Ibu, apakah proses perencanaan sudah berdasarkan masalah dan kebutuhan masyarakat secara mayoritas?
	Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka? Bisa ceritakan siapa saja yang hadir.	Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka? Bisa ceritakan siapa saja yang hadir.	Menurut Bapak/Ibu, apakah perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka? Bisa ceritakan siapa saja yang hadir.
Partisipatory	Menurut Bapak/Ibu, apakah peserta yang hadir dalam berbagai tahapan PPK (sebutkan apa saja), telah mewakili kelompok masyarakat miskin dan perempuan?	Menurut Bapak/Ibu, apakah peserta yang hadir dalam berbagai tahapan PPK (sebutkan apa saja), telah mewakili kelompok masyarakat miskin dan perempuan?	Menurut Bapak/Ibu, apakah peserta yang hadir dalam berbagai tahapan PPK (sebutkan apa saja), telah mewakili kelompok masyarakat miskin dan perempuan?

Lanjutan Lampiran 3. Interview Guide

	Apakah setiap peserta mempunyai peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran?	Apakah setiap peserta mempunyai peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran?	Apakah setiap peserta mempunyai peluang yang sama dalam memberikan sumbangan pemikiran?
	Apakah sumbangan pemikiran/usulan itu mudah disampaikan dalam proses perencanaan? Ada kendala?	Apakah sumbangan pemikiran/usulan itu mudah disampaikan dalam proses perencanaan? Ada kendala?	Apakah sumbangan pemikiran/usulan itu mudah disampaikan dalam proses perencanaan? Ada kendala?
	Apakah masyarakat mengalami kendala waktu/tempat/jarak dalam menghadiri pertemuan terkait program PPK?	Apakah masyarakat mengalami kendala waktu/tempat/jarak dalam menghadiri pertemuan terkait program PPK?	Apakah masyarakat mengalami kendala waktu/tempat/jarak dalam menghadiri pertemuan terkait program PPK?
	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas? Siapa saja yang	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas? Siapa saja yang	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memutuskan kegiatan yang dianggap prioritas? Siapa saja yang

Lanjutan Lampiran 3. Interview Guide

	hadir?	hadir?	hadir?
	Apakah perencanaan pembangunan (dan tahapan PPK lain, sebutkan) telah dapat mengakomodasi semua sumbangan pemikiran masyarakat miskin?	Apakah perencanaan pembangunan (dan tahapan PPK lain, sebutkan) telah dapat mengakomodasi semua sumbangan pemikiran masyarakat miskin?	Apakah perencanaan pembangunan (dan tahapan PPK lain, sebutkan) telah dapat mengakomodasi semua sumbangan pemikiran masyarakat miskin?
	Bagaimana respon masyarakat lain (yang tidak hadir) terhadap program PPK?	Bagaimana respon masyarakat lain (yang tidak hadir) terhadap program PPK?	Bagaimana respon masyarakat lain (yang tidak hadir) terhadap program PPK?
Keselarasan Program PPK		Apakah ada kerjasama antar desa dalam penyelenggaraan PPK?	Apakah ada kerjasama antar pendamping dalam penyelenggaraan PPK?
		Bagaimana interaksi diantara stakeholder dalam proses tahapan PPK?	Bagaimana interaksi diantara stakeholder dalam proses tahapan PPK?
		Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme proses tahapan PPK di	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme proses tahapan PPK di

Lanjutan Lampiran 3. Interview Guide

		desa bapak/ibu?	desa bapak/ibu?
		Menurut Bapak/Ibu, apakah proses tahapan PPK telah dilaksanakan dengan mengacu kepada semua peraturan yang berlaku terkait Program PPK?	Menurut Bapak/Ibu, apakah proses tahapan PPK telah dilaksanakan dengan mengacu kepada semua peraturan yang berlaku terkait Program PPK?
	Apa yang anda ketahui tentang PPK? (tanyakan diawal pertemuan)	Apa yang anda ketahui tentang PPK? (tanyakan diawal pertemuan)	Apa yang anda ketahui tentang PPK? (tanyakan diawal pertemuan)